

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH
DALAM MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR DI LUAR SEKOLAH
(Suatu Studi Pada SMP Negeri I Waru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**QURNIA RICKY .Y
NIM. 0210310076**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

MALANG

2006

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Sabtu

Tanggal : 14 Oktober 2006

Jam : 09.00

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH
DALAM MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR DI LUAR KELAS (Suatu Studi di SLTPN I
Waru Kabupaten Sidoarjo)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Drs. Imam Hardjanto, MBA, MPA, Dip.Sp
Ketua

Drs. Dwi Sulistiyo, MPA
Anggota

Drs. Irwan Noor, MA
Anggota

Drs. Rojikin, MAP
Anggota

ABSTRAKSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH DALAM
MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI LUAR SEKOLAH
(Suatu Studi di SMP Negeri I Waru Kabupaten Sidoarjo)
Oleh : Qurnia Ricky .Y,2006, 139 Halaman

Salah satu tugas mulia Komite Sekolah adalah memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Dengan adanya komite sekolah maka tiap sekolah tidak akan mengalami kesulitan dalam hal dana. Dengan adanya KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) membuat peran Komite Sekolah sangat penting. Para orang tua murid lebih banyak terlibat dalam keberhasilan pendidikan anaknya.

Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan yang melaksanakan Komite Sekolah dapat diamati di kabupaten Sidoarjo. Diknas Sidoarjo berupaya untuk mengubah agar tiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui Komite Sekolah. Dimana fasilitas sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga diharapkan tiap murid dapat memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar di luar sekolah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pengaruh kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah konsep dasar implementasi kebijakan, Komite Sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan luar sekolah. Metode yang dipakai adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana fokus penelitiannya antara lain implementasi kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi terkait (Dinas Pendidikan) mengenai Komite Sekolah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru mengenai Komite Sekolah. Peran orang tua murid dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dilihat dari tingkat partisipasi orang tua murid dalam menentukan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dan bentuk partisipasi orang tua murid dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui pelaksanaan Komite Sekolah. Upaya yang dilakukan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain menyusun pengadaan sarana dan prasarana di luar sekolah, kegiatan pembelajaran karya Wisata dan kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya, mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah, dan melakukan program kerjasama dengan pihak luar Sekolah. Faktor yang menghambat pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru Dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo

menyusun kebijakan operasional untuk suksesnya pelaksanaan Komite Sekolah dan melakukan peninjauan apakah Komite Sekolah di sekolah tersebut ada dan berfungsi sebagaimana yang digariskan. Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru memberikan pembekalan kepada para guru dan orang tua murid tentang Komite Sekolah kemudian membentuk Komite Sekolah beserta program – program yang dibuat Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Peran serta orang tua murid terlihat dari tingkat partisipasi dalam menentukan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tinggi sekaligus memberikan bantuan baik berupa immateriil maupun materiil sebagai bentuk peran serta orang tua murid. Upaya yang dilakukan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain menyusun pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran karya wisata, kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya dimana Komite Sekolah mencarikan dana dan mendatangkan alat kerajinan tangan untuk membuat kerajinan sepatu dan mendatangkan 20 unit komputer. Komite Sekolah juga mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah sesuai dengan bidangnya dan ada yang merupakan alumni SMP Negeri I Waru. Selain itu, Komite Sekolah melakukan program kerjasama dengan pihak luar sekolah antara lain bekerjasama dengan pengrajin sepatu, bekerjasama dengan penjual kerajinan di Pasar Gedongan Waru, dan bekerjasama dengan agen perjalanan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru terdiri dari faktor intern yaitu terbatasnya waktu yang dipunyai anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan aktivitas Komite Sekolah, orang tua murid belum sepenuhnya memahami makna penting kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Selain itu, juga terdapat faktor ekstern yaitu pihak luar / masyarakat lebih memperhitungkan keuntungan yang didapatnya bila melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dan mereka belum mengerti tentang kegunaan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah bagi para murid.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo membuat pengaturan yang lebih rinci tentang Komite Sekolah. Selain itu, melakukan pengawasan yang rutin setidaknya 6 bulan sekali terhadap semua Komite Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru melakukan terobosan semisal dengan membuka kelas Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai kegiatan ekstra tambahan disamping ekstra komputer yang sudah ada lebih dahulu. Memasyarakatkan secara intensif tentang keberadaan Komite Sekolah menyangkut fungsi dan programnya lewat media, brosur, dan pertemuan – pertemuan sehingga tidak terjadi ada orang tua dan guru yang tidak mengetahui tentang Komite Sekolah. Masyarakat dan orang tua murid SMP Negeri I Waru untuk terus bekerjasama mendukung setiap kebijakan dan program yang bersifat positif yang ditawarkan pihak sekolah dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah khususnya melalui pelaksanaan Komite Sekolah ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI LUAR SEKOLAH (Suatu Studi Pada SMP Negeri I Waru Kabupaten Sidoarjo)**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Adiministrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, M.A, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Drs. Imam Hardjanto M.BA, M.PA, Dip.Sp, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran, perhatian dan ketelatenan, telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran dan dorongan moril yang sangat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Dwi Sulistiyo M.PA, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran, perhatian dan ketelatenan, telah meluangkan waktu dan banyak

memberikan bantuan berupa bimbingan, saran dan dorongan moril yang sangat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Adiministrasi yang telah membantu kelancaran selama studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Fathurrahman M.,M.Sc dan para guru SMP Negeri I Waru yang telah bersedia memberikan informasi dengan wawancara yang dilakukan penulis.
7. Ibu Sri Utami selaku Humas SMP Negeri I Waru yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan bagi penulis selama penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, Ricke, Ricko yang telah memberikan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan yang tak pernah usai selama studi hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Teman-teman FIA Publik 2002 yang telah memberikan semangat dan hiburan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, September 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan	11
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2. Model-Model Implementasi Kebijakan	16
3. Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan	17
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan	19
B. Komite Sekolah	20
1. Makna Komite Sekolah	20
2. Hambatan yang Dihadapi Komite Sekolah	24
C. Kegiatan Belajar Mengajar	25
1. Makna Belajar	25
2. Makna Mengajar	28
3. Makna Belajar Mengajar	32
D. Kegiatan Luar Sekolah	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	47
1. Instansi Pelaksana Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru	47
a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.....	47
b. Gambaran Umum SMP Negeri I Waru.....	53
2. Proses Implementasi Kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru.....	70
a. Pelaksanaan yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait (Dinas Pendidikan) Mengenai Komite Sekolah	70
b. Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru Mengenai Komite Sekolah.....	74
3. Peran Serta Orang Tua Murid Dalam Menunjang Tugas – Tugas Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru.....	78
a. Tingkat Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menentukan Kebijakan yang Dapat Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah	78
b. Bentuk Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah Melalui Pelaksanaan Komite Sekolah	79
4. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Di Luar Sekolah....	83
a. Menyusun Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Luar Sekolah, Kegiatan Pembelajaran Karya Wisata dan Kegiatan Pembelajaran Ketrampilan Lainnya	83
b. Mendatangkan Tenaga Pengajar Dari Luar Sekolah.....	85
c. Melakukan Program Kerjasama Dengan Pihak Luar Sekolah....	86
5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah	88
a. Faktor intern	88
b. Faktor ekstern.....	89
B. Analisis dan Interpretasi	92
1. Proses Implementasi Kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru.....	92
a. Pelaksanaan yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait (Dinas Pendidikan) Mengenai Komite Sekolah	92
b. Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru Mengenai Komite Sekolah.....	94
2. Peran Serta Orang Tua Murid Dalam Menunjang Tugas – Tugas Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru.....	96
a. Tingkat Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menentukan Kebijakan yang Dapat Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah	96

b. Bentuk Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah Melalui Pelaksanaan Komite Sekolah	97
3. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Di Luar Sekolah....	99
a. Menyusun Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Luar Sekolah, Kegiatan Pembelajaran Karya Wisata dan Kegiatan Pembelajaran Ketrampilan Lainnya	99
b. Mendatangkan Tenaga Pengajar Dari Luar Sekolah.....	100
c. Melakukan Program Kerjasama Dengan Pihak Luar Sekolah....	101
4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah	103
a. Faktor intern	103
b. Faktor ekstern.....	104

BAB V PENUTUP

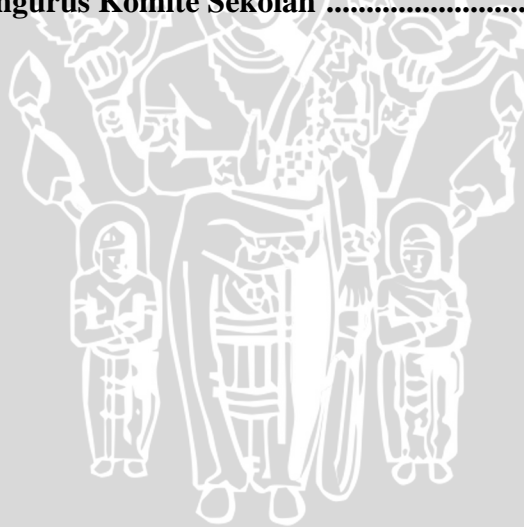
A. Kesimpulan	105
B. Saran	109

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



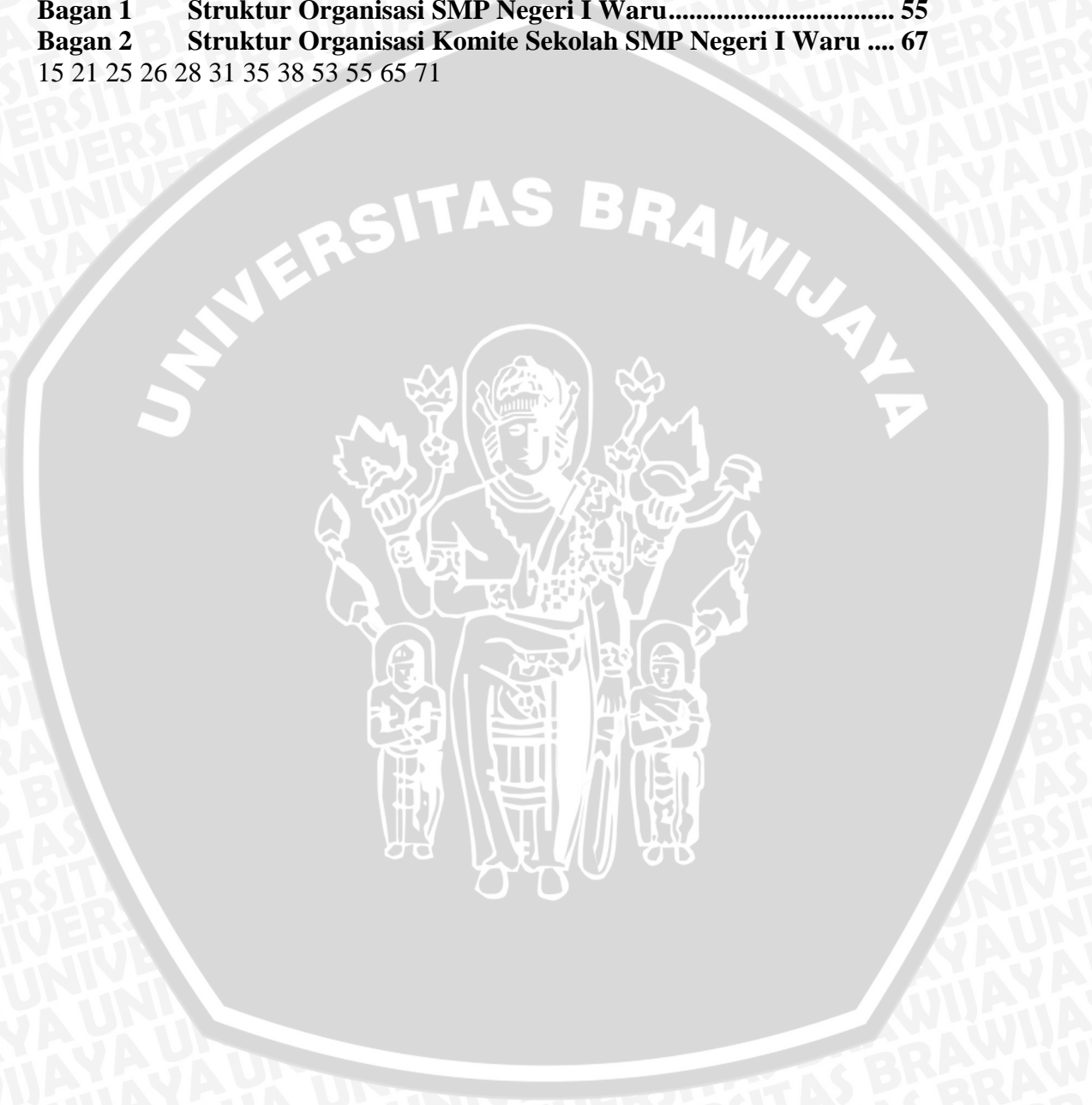
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kelembagaan Pendidikan.....	51
Tabel 2	Data SMP Negeri.....	51
Tabel 3	Data SMA Negeri	52
Tabel 4	Data SMK Negeri	52
Tabel 5	Data Peserta Didik	53
Tabel 6	Guru Menurut Tempat Tugasnya	54
Tabel 7	Data Peserta Didik SMP Negeri I Waru	56
Tabel 8	Data Guru SMP Negeri I Waru	58
Tabel 9	Latar Belakang Pendidikan Guru SMP Negeri I Waru.....	58
Tabel 10	Kondisi Karyawan SMP Negeri I Waru	59
Tabel 11	Tenaga Pengajar Kegiatan Ekstra Kurikuler	60
Tabel 12	Sarana dan prasarana SMP Negeri I Waru	61
Tabel 13	Data Prestasi Murid Bidang Non Akademis	65
Tabel 14	Data Prestasi Murid Bidang Akademis	66
Tabel 15	Susunan Pengurus Komite Sekolah	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi SMP Negeri I Waru..... 55
Bagan 2 Struktur Organisasi Komite Sekolah SMP Negeri I Waru 67
15 21 25 26 28 31 35 38 53 55 65 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas mulia Komite Sekolah adalah memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Selama ini, para orang tua murid selalu sulit untuk dimintai sumbangan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya komite sekolah maka tiap sekolah tidak akan mengalami kesulitan dalam hal dana. Selain itu, komite sekolah juga berperan dalam hal mengawasi pelaksanaan pendidikan agar berjalan dengan baik.

Dengan adanya KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) membuat peran Komite Sekolah sangat penting. Para orang tua murid lebih banyak terlibat dalam keberhasilan pendidikan anaknya. Keterlibatan orang tua murid dalam proses pendidikan sekolah akan mempunyai dampak pada semangat belajar peserta didik. Artinya, keberhasilan belajar peserta didik amat dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua murid. Dimana sebelum KBK orang tua murid sedikit terlibat dalam keberhasilan pendidikan anaknya.

Pelaksanaan Komite Sekolah di beberapa daerah tidak berjalan dengan baik bahkan tidak aktif. Kebanyakan sekolah yang terdapat di daerah pinggiran kota dan bukan favorit Komite Sekolahnya tidak aktif. Hal ini diakibatkan orang yang terlibat

dalam Komite Sekolah kebanyakan bukan orang yang berpendidikan tinggi. Sedangkan sekolah yang termasuk favorit, Komite Sekolahnya berjalan dengan baik karena orang yang terlibat di dalamnya merupakan orang – orang yang berpendidikan tinggi.

Melalui Komite Sekolah diharapkan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dapat berjalan dengan baik. Pendidikan merupakan wadah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Disamping itu, pendidikan memegang peranan paling strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dalam kaitan mencapai kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Dari tahun ke tahun pendidikan di Indonesia banyak kelemahan.sehingga kualitas pendidikan masih sangat memprihatinkan yaitu berada di urutan paling belakang dibandingkan dengan pendidikan bangsa – bangsa lain di tingkat regional maupun internasional. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh Hadiyanto (2004:40) :

”Dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh *International Educational Achievement* (IEA) menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia berada pada urutan ke -38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat SMP, studi untuk kemampuan matematika, peserta didik SMP di Indonesia hanya berada pada urutan ke - 39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga berada pada peringkat terakhir yaitu urutan ke – 40 dari 42 negara peserta.”

Umumnya pendidikan tingkat SMP mengalami kekurangan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Dengan kurangnya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, maka kebanyakan murid SMP hanya memperoleh pendidikan di dalam sekolah dibandingkan pendidikan di luar sekolah. Padahal dengan adanya pendidikan di luar sekolah dapat menambah bekal pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya dapat dipergunakan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi keseimbangan antara pendidikan di luar sekolah dan di dalam sekolah diperlukan agar murid tersebut mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang lebih luas.

Selama ini terlihat bahwa banyak gedung sekolah terutama SMP yang rusak bahkan tidak memenuhi syarat untuk diadakan kegiatan belajar mengajar. Bahkan ada sekolah yang atapnya hampir roboh sehingga dapat membahayakan jiwa murid SMP yang ingin menimba ilmu di sekolah tersebut. Kebanyakan gedung – gedung SMP yang ada merupakan bangunan lama dan belum direnovasi. Oleh karena itu, untuk melakukan renovasi SMP tidak hanya bergantung pada dana yang dikucurkan oleh Pemerintah saja melainkan juga mengikutsertakan peran masyarakat dalam melakukan renovasi sekolah – sekolah tersebut.

Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan dapat diamati di kabupaten Sidoarjo yang berusaha untuk mencetak mutu Sumber Daya Manusia berkualitas dan mempunyai ketrampilan. Fasilitas sarana dan prasarana yang baik dapat

menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga diharapkan tiap murid dapat memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar di luar sekolah.

Diknas Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengubah agar tiap sekolah mempunyai sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Seperti yang digariskan Diknas Pusat, tiap sekolah diharapkan mempunyai Komite Sekolah sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap pendidikan anaknya yang ditetapkan. Dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan tidak terjadi ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan ketrampilannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain melalui fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Menyangkut kegiatan belajar mengajar, berdasarkan kurikulum 1994 lebih cenderung dilakukan di dalam sekolah tetapi berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi proses belajar mengajar dilaksanakan di dalam sekolah dan di luar sekolah. Dengan demikian posisi Komite Sekolah menjadi sangat penting. Hal ini karena mengingat Komite Sekolah mempunyai tugas dan fungsi dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar sekolah sangat diperlukan pada era globalisasi. Dengan adanya kegiatan belajar mengajar di luar sekolah diharapkan para murid dapat memperoleh pengetahuan tidak hanya teori di dalam

sekolah melainkan teori dalam sekolah dapat diaplikasikan pada kehidupan luar. Jadi para murid tidak hanya pintar pelajaran tapi juga pintar dalam mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya. Kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dapat berupa ekstra kurikuler maupun dalam bentuk *outbound*.

Dengan adanya kegiatan seperti ekstra kurikuler maka para murid dapat menyalurkan hobinya serta menambah ketrampilan yang dimilikinya. Kegiatan ini dapat membuat gairah untuk belajar tidak turun karena mereka tidak merasa bosan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mereka tidak hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah melainkan juga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Kegiatan *outbound* yang merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan lingkungan sekitarnya sehingga mereka diharapkan nantinya dapat bersosialisasi dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Kegiatan *Outbound* ini diharapkan merupakan aplikasi pelajaran yang diperoleh dalam kelas dapat diaplikasikan dengan baik. Kegiatan semacam ini membuat para murid belajar pada alam sekitar yang merupakan wujud dari pelajaran ilmu pengetahuan alam dimana di dalamnya banyak berhubungan dengan alam sekitarnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mendorong para murid untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sekaligus mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan wujud dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial dimana

di dalamnya banyak berhubungan dengan masyarakat seperti tata cara pergaulan dengan masyarakat, kebiasaan masyarakat di suatu daerah.

Dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah para murid akan memperoleh pengetahuan yang sangat luas, tidak hanya pengetahuan yang diperoleh dalam kelas melainkan pengetahuan yang diperoleh dari keadaan lingkungan sekitarnya sehingga mempunyai wawasan pandangan yang luas. Selain itu, para murid dapat menambah atau memperoleh ketrampilan yang baru. Ketrampilan yang didapat dari kegiatan belajar mengajar di luar sekolah ini diharapkan menjadi bekal untuk menuju ke jenjang sekolah yang lebih tinggi atau dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Dengan adanya Komite Sekolah diharapkan orang tua dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Pemberdayaan Komite Sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dengan harapan mampu mendorong meningkatnya kualitas pendidikan baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang bertambah luas.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI LUAR SEKOLAH”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memperoleh pembahasan yang lebih sistematis, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru ?
2. Bagaimana peran serta orang tua murid dalam menunjang tugas - tugas Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru ?
3. Upaya apa yang dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah?
4. Faktor - faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan Komite Sekolah khususnya SMP Negeri I Waru.

2. Untuk mengetahui peran serta wali murid dalam menunjang tugas – tugas Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru.
3. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
4. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

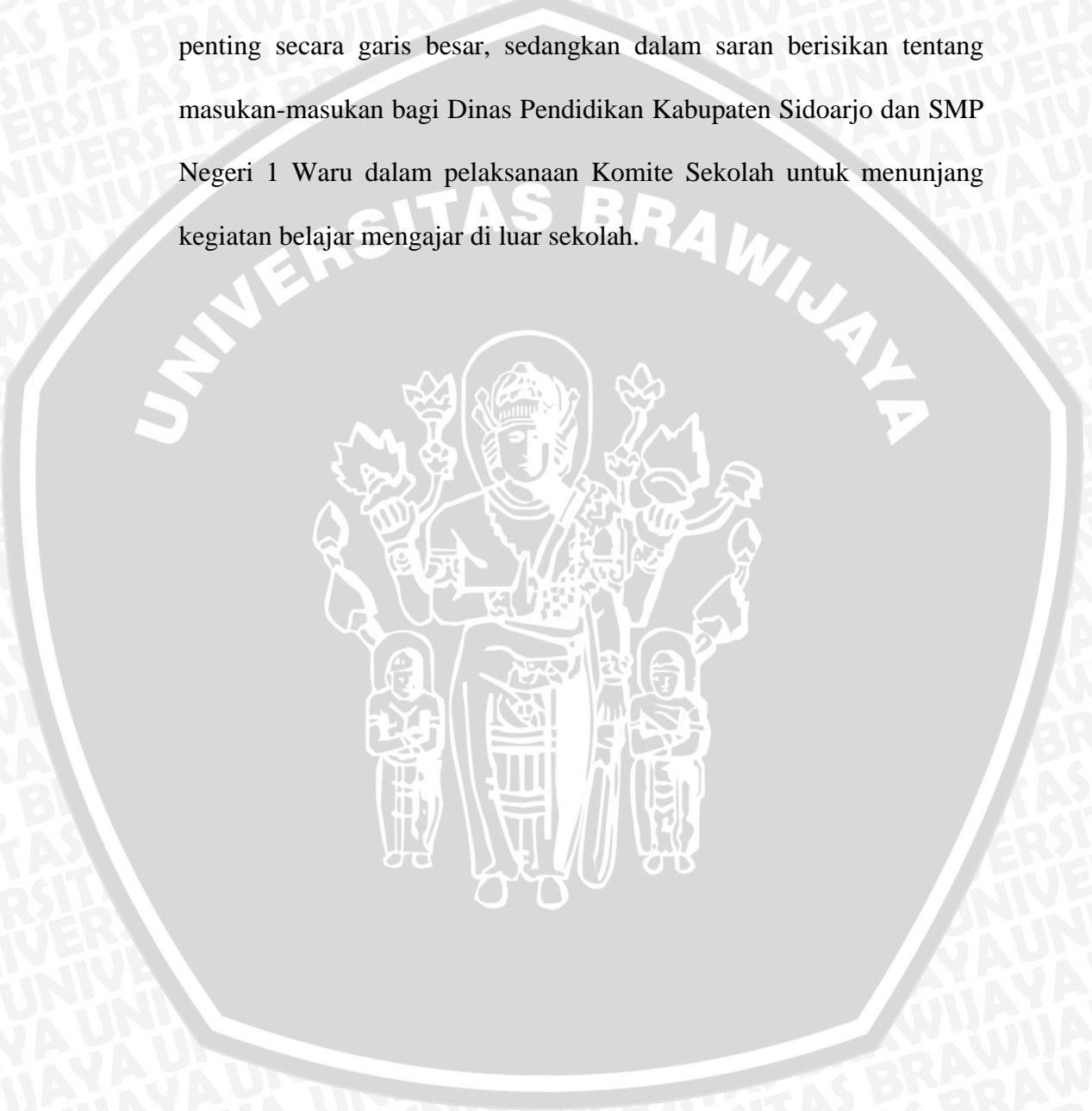
1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan Ilmu Administrasi pada umumnya dan Kebijakan Publik pada khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi SMP Negeri I Waru dalam pelaksanaan kebijakan Komite Sekolah.
3. Menambah wawasan bagi penulis dalam pemecahan masalah tentang pelaksanaan kebijaksanaan komite sekolah.
4. Memberikan sumbangan informasi ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang sama dengan analisa yang lebih baik dan sempurna.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan, peneliti menyusun materi dan penulisan ini dalam lima bab untuk mempermudah dan memperlancar pihak – pihak yang mempunyai perhatian terhadap penelitian ini didasarkan pada buku panduan yang tersedia dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, bab ini pembahasannya diawali dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sebagai penutup menguraikan tentang sistematika pembahasan;
- Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini menyangkut masalah sejauh mana implementasi kebijakan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah di SMP Negeri 1 Waru;
- Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Karena metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka uraian dalam bab ini menggunakan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis analisis;
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang data hasil penelitian, analisis data, dan interpretasi data;

Bab V : Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan SMP Negeri 1 Waru dalam pelaksanaan Komite Sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Seperti diketahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Menurut Wahab (2004:17) kebijakan memiliki suatu siklus yang dimulai dari agenda *setting*, formulasi, implementasi, evaluasi, perubahan, dan kembali lagi ke agenda *setting*.

Agenda *setting* adalah proses terbentuknya kebijakan yang menganalisa kondisi awal dikeluarkannya kebijakan termasuk adanya isu-isu yang berkembang. Dalam agenda *setting* diketahui dua model kebijakan yaitu model pluralis apabila dalam perumusan kebijakan melibatkan masyarakat dan model elitis jika hanya penguasa yang merumuskan kebijakan tersebut. Formula kebijakan adalah bentuk formal atau resmi dari kebijakan yang dikeluarkan yang berlaku mengikat bagi yang terkena kebijakan tersebut saat kebijakan tersebut dikeluarkan oleh penguasa. Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang kemudian selama kurun waktu tertentu dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut layak atau tidak layak sehingga perlu adanya perubahan. Seluruh mekanisme ini dapat menjadi suatu isu

yang diperhatikan kembali ketika akan dibuat kebijakan yang baru. Dari siklus kebijakan ini, maka sesuai dengan judul pembahasan maka berada pada tahap implementasi kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Wahab (2004:64), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dan menurut Kamus Webster dalam Wahab (2004:64) secara singkat merumuskan implementasi yaitu “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) “*to give practical effect to*” (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Lebih lanjut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian”.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya menyangkut tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Ketaatan kelompok sasaran dimaksudkan dalam tulisan penelitian ini ditinjau dari dua aspek :

1. Ketaatan *target group* yaitu ketaatan obyek yang menjadi sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo dengan segenap kemampuannya senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kebijakan pendidikan Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan komite sekolah.
2. Ketaatan pelaksana administrasi yaitu aparatur pelaksana dalam memfasilitasi proses implementasi kebijakan pendidikan Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan komite sekolah terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan harus dirumuskan secara benar mengenai permasalahan yang akan diselesaikan termasuk memprediksi segala hambatan dan akibat yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2002:19) yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan tersebut menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan untuk bertindak dalam usaha mengatasi masalah-masalah baik publik ataupun organisasi. Bentuk penerapan kebijakan publik dapat berupa program atau proyek, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik maupun dapat berbentuk sebagai keputusan pemerintah untuk menghadapi suatu masalah tertentu.”

Dari pengertian tersebut, cukup jelas bahwa kebijakan pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga termasuk sebagai kebijakan negara, sehingga berlaku bagi seluruh masyarakat sebagaimana tersebut dalam kebijakan tersebut.

Apabila kedua konsep diatas (konsep implementasi dan konsep kebijakan) digabungkan menjadi satu konsep, maka akan mempunyai arti tertentu, yaitu implementasi kebijakan dimana dalam Kamus Webster dalam Wahab (2004:64) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden).

Sedangkan Wibawa (1994 : 41 - 43) menyebutkan bahwa determinan kinerja implementasi kebijakan dapat ditafsirkan sebagai berikut : pertama – tama efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada sejauh mana sumber daya dan personil yang disediakan oleh sistem kebijakan memiliki jumlah dan kualitas yang memadai. Jika keduanya dalam keadaan yang memadai maka birokrasi pelaksana tidak perlu menghimpun dukungan sumber daya dari lingkungan. Birokrasi dapat lebih otonom dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga desakan dari aktor lain yang bermaksud mempengaruhi beberapa aspek implementasi dapat ditolak. Tapi di pihak lain hal ini menimbulkan kesan otoriternya birokrasi.

Manajemen yang merupakan kandungan dari suatu kebijakan sangat berpengaruh terutama terhadap teknik implementasi yang dilakukan oleh birokrasi. Koersi, persuasi atau demokrasikah yang akan dipilih oleh birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan seringkali sangat ditentukan oleh manajemen yang digariskan oleh kebijakan tersebut. Aspek ini juga akan membawa konsekuensi oleh

gaya implementasinya, sentralisasi atau desentralisasi. Sementara itu manajemen yang terumuskan dalam suatu kebijakan ditentukan oleh jenis tujuan dan masalah yang akan diintervensi oleh kebijakan itu sendiri. Persoalan kebijakan yang lebih bersifat privat yang hanya menyentuh relatif tidak banyak orang membutuhkan manajemen yang lebih sederhana dibandingkan kebijakan yang menyentuh masalah relatif banyak orang. Demikian juga waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan akan mempengaruhi prosedur manajemen yang harus dijalankan oleh mesin birokrasi.

Teknik dan gaya implementasi kebijakan yang dianut oleh mesin birokrasi selain terdikte oleh isi kebijakan dapat pula dipandang sebagai cerminan dari karakteristik lingkungannya. Dalam suatu lingkungan yang bersifat urban, birokrasi mungkin akan memainkan gaya yang demokratis sementara di tengah masyarakat rural birokrasi akan bertindak lebih koersif dan otoriter. Tapi semua itu sudah barang tentu tidak terlepas dari *political will* pemerintah. Hanya saja meskipun *political will* merupakan faktor penentu ia bukan variabel otonom yang adanya tanpa sebab.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah penerapan suatu ketentuan dan program dari Komite Sekolah dalam menyikapi permasalahan pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar di luar sekolah.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam Implementasi Kebijakan terdapat tiga model yang berkembang dan akhirnya seringkali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan. Seperti yang dikemukakan Wahab (2004:71-82), model-model tersebut antara lain :

1. Model yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dikenal dengan model "*the top down approach*". Dengan model ini supaya implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu. Syaratnya adalah sebagai berikut :
 - a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
 - b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
 - e. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 - f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - h. Tugas-tugas harus diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - j. Pihak - pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntun dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini lebih menekankan pada kebijaksanaan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikenal dengan model proses implementasi kebijakan. Dengan model ini implementasi kebijakan dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi konsep-konsep seperti: perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Dikemukakan oleh kedua ahli tersebut hubungan antara kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling terkait. Variabel-variabel tersebut adalah :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
 - b. Sumber-sumber kebijakan.
 - c. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana.
 - d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
 - e. Sikap para pelaksana.
 - f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik.
3. Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut kerangka analisis Implementasi.
- Dalam model ini, implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori dasar, yaitu :
- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
 - b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
 - c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Model implementasi kebijakan dalam penulisan ini adalah model yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn yang dikenal dengan model *“the top down approach”*.

3. Pendekatan -Pendekatan Implementasi

Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai acuan dalam implementasi kebijakan dengan melihat situasi dan kondisi dimana kebijakan akan diimplementasikan. Dalam hal pendekatan implementasi kebijakan ini, Wahab (2004:110-120) mengemukakan beberapa pendekatan yang seringkali digunakan yang antara lain :

1. Pendekatan struktural (*structural approaches*)
Pendekatan ini menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dan organisasi yang baik kini harus diubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula.
2. Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)
Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan. Disini implementasi dipandang sebagai masalah manajerial, dimana prosedur-prosedur yang dimaksud diantaranya yang menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja.
3. Pendekatan keperilakuan (*behavioral approaches*)
Pendekatan keperilakuan adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijaksanaan yang baru dikeluarkan, oleh karena itu harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu juga mempersiapkan sarana yang diperlukan serta musyawarah sehingga dapat memberikan pengertian yang mendalam dan akhirnya kebijaksanaan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pimpinan menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.
4. Pendekatan politik (*political approaches*)
Pendekatan politik adalah mengasumsikan bahwa keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan bergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan / berpengaruh untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain pendekatan ini lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya.

Dari beberapa pendekatan implementasi kebijakan tersebut, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan keperilakuan (*behavioral approaches*). Hal ini

mengingat ada keterkaitan antara permasalahan yang telah dirumuskan dengan pendekatan implementasi kebijakan ini.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini, tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsire (dalam Wahab, 2004:61) dinamakan sebagai *implementation gap*, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams dalam Wahab (2004:61) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *implementation capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi / aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Islamy (2002:107) mengatakan bahwa suatu kebijakan negara menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.

Grindle dalam Wahab (2004:127) menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai apabila :

- a. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci;
- b. Program-program aksi telah dirancang;
- c. Sejumlah biaya atau dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan negara boleh dikatakan sekedar retorika atau slogan politik belaka.

B. Komite Sekolah

1. Makna Komite Sekolah

Banyak hal dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah terhadap sekolah, yang pada gilirannya sangat membantu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.

Mengenai Komite Sekolah Arindawati dan Huda (2004:38) menyatakan bahwa peran serta Komite Sekolah dan pemerhati pendidikan yang pro – aktif dapat memperlancar proses pembelajaran dengan membantu mencari penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah, hal ini akan sangat berarti.

Keberadaan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dimana Komite Sekolah berkedudukan di setiap sekolah.

Keanggotaan Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 yaitu terdiri dari unsur masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik) dan unsur dewan guru, yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan. Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang). Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

Fattah (2004:149) menyebutkan bahwa pembentukan komite sekolah dimaksudkan untuk menangani pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah (SD dan MI), dan pembangunan unit gedung baru (SLTP dan MTS). Sedangkan di SMK (Teknologi Industri, Bisnis, dan Pariwisata) mempunyai peran menjembatani sekolah dengan industri dalam pelaksanaan PSG dan bursa kerja khusus (kerjasama dengan Disnaker Mobduk dalam pemasaran lulusan SMK)

Pembentukan Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 menganut prinsip-prinsip antara lain transparan, akuntabel, demokratis dan merupakan mitra satuan pendidikan.

UU No.20 tahun 2003 pasal 56 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, yang berperan:

- 1) Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- 2) Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 berperan sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Fungsi Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan Pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan.
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d. Kriteria tenaga kependidikan.
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan.
 - f. Hal – hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Keterlibatan komite sekolah menurut Hadiyanto (2004 :91) dalam pengembangan sekolah meliputi :

1. Merumuskan dan menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah.
2. Menganalisis tantangan nyata di sekolah.
3. Menetapkan sasaran dan target yang akan dicapai.
4. Melakukan identifikasi fungsi yang diperlukan setiap sasaran.
5. Melakukan analisis SWOT.
6. Mengidentifikasi alternatif / langkah pemecahan masalah.

Dalam penulisan ini Komite Sekolah yang dimaksud adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yang terdapat di SMPN I Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Hambatan Yang Dihadapi Komite Sekolah

Perubahan sistem pendidikan yang sedang terjadi di tanah air terkesan kurang dipahami. Terutama dengan dibentuknya Komite Sekolah diantaranya mempunyai tujuan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melakukan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

Beberapa pandangan yang dikemukakan bahwa terdapat hambatan – hambatan yang dihadapi Komite Sekolah. Menurut Sukirno (2006 : IV) perlu ada pedoman kerja tertulis yang jelas dan baku sebagai acuan dasar dari Komite Sekolah dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Komite Sekolah cenderung dipersepsikan kesinambungan dengan lembaga – lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, khususnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3). Kepala Sekolah sebuah SMP Negeri memandang Komite Sekolah yang ada di sekolahnya hanya sebagai lembaga BP-3 dengan baju baru. Selama ini Komite Sekolah hanya bertugas jika dipanggil sekolah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, seorang ketua yayasan pendidikan swasta memandang bahwa pembentukan Komite Sekolah sebagai lembaga stempel. Menurut Sukirno (2006 : 3) ada beberapa tipe komite sekolah antara lain :

1. Komite Sekolah yang benar – benar membantu perkembangan sekolah.

2. Komite Sekolah yang tidak memberi pengaruh apapun kepada sekolah, artinya tidak membebani namun juga tidak memberikan kontribusi dan Komite Sekolah cenderung menyerahkan segalanya kepada sekolah.
3. Komite Sekolah yang menjadi beban sekolah karena dilantik Dinas Pendidikan lalu Komite Sekolah merasa menjadi kepanjangan tangan Dinas Pendidikan sekaligus pemilik sekolah. Akibatnya, terjadi konflik antara Komite Sekolah dan yayasan.

Menyangkut tentang keberadaan Komite Sekolah, karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kedudukan dan tugas Komite Sekolah, ada Kepala Sekolah di salah satu sekolah yang membekukan Komite Sekolah. Di sekolah lain, ada Komite Sekolah yang dalam waktu tiga tahun sudah berganti susunan anggota sampai tiga kali. Mengenai hal tersebut Supraktinya (2004 :372) mengatakan seorang Kepala Sekolah di SMP Negeri ada hambatan yang dijumpai bahwa tidak semua guru terkesan memahami perubahan sistem yang terjadi dan birokrasi Pemerintah kurang memahami menyangkut penugasan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di satuan tugasnya diperluas.

C. Kegiatan Belajar mengajar

1. Makna Belajar

Menurut Sagala (2003:12) Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan ketrampilan dengan cara mengolah bahan belajar.

Belajar menurut B.F Skinner dalam Sagala (2003:14) adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar

juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar maka responnya menurun.

Belajar menurut H.C Witherington dalam Usman dan Setiawati (1993:5) adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian.

Menurut Sagala (2003:39) ada tiga rumpun besar teori belajar menurut pandangan psikologi antara lain :

1. Teori Disiplin Mental

Teori ini menganggap bahwa dalam belajar mental siswa didisiplinkan atau dilatih. Dalam mengajar siswa membaca misalnya, guru melatih “otot-otot” mental siswa. Guru ini mula – mula akan memberikan daftar kata – kata yang diinginkannya dengan menggunakan kartu – kartu dimana tertulis setiap kata itu. Selanjutnya mereka melatih siswa – siswa mereka dan setiap hari diberi tes dan siswa yang belum pandai harus kembali sesudah jam sekolah untuk dilatih lagi.

2. Teori Behaviorisme

Menurut teori ini tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara perangsang - jawaban sebanyak - banyaknya. Siapa yang menguasai hubungan perangsang - jawaban sebanyak – banyaknya ialah orang yang berhasil dalam belajar. Pembentukan hubungan perangsang - jawaban dilakukan melalui ulangan – ulangan.

3. Teori *Cognitive Gestalt-Filed*

Menurut teori ini semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan – hubungan terutama hubungan-hubungan antar bagian dan keseluruhan. Guru tidak memberikan bagian – bagian bahan ajaran tetapi selalu satu kesatuan yang utuh dan murid harus berusaha menemukan hubungan antar bagian, memperoleh pemahaman terhadap hubungan antar bagian – bagian dalam suatu permasalahan agar ia dapat memahami keseluruhan bahan ajaran tersebut.

Prinsip belajar menurut Sagala (2003:54) antara lain :

1. *Law of effect* yaitu bila hubungan antara stimulus dengan respon terjadi dan diikuti dengan keadaan memuaskan maka hubungan itu diperkuat. Jadi hasil belajar akan diperkuat bila menumbuhkan rasa senang.
2. *Spread of effect* yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan tetapi kepuasan mendapat pengetahuan baru.
3. *Law of exercise* yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat dengan latihan dan penguasaan. Jadi hasil belajar dapat lebih sempurna apabila sering diulang dan sering dilatih.
4. *Law of readiness* yaitu bila satuan – satuan dalam sistem syaraf telah siap berkonduksi dan hubungan itu berlangsung maka terjadinya hubungan itu akan memuaskan. Dalam hubungan ini tingkah laku baru akan terjadi apabila yang belajar telah siap belajar.
5. *Law of primacy* yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama akan sulit digoyahkan.
6. *Law of intensity* yaitu belajar memberi makna yang dalam apabila diupayakan melalui kegiatan yang dinamis.
7. *Law of recency* yaitu bahan yang baru dipelajari akan lebih mudah diingat.
8. Fenomena kejenuhan adalah suatu penyebab yang menjadi perhatian signifikan dalam pembelajaran. Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang dipakai untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil karena antara lain kelelahan mental dan indra – indra.
9. *Belongingness* yaitu keterikatan bahan yang dipelajari pada situasi belajar akan mempermudah berubahnya tingkah laku. Hasil belajar yang memberikan

kepuasan dalam proses belajar dan latihan yang diterima erat kaitannya dengan kehidupan belajar. Proses belajar yang demikian ini akan meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik.

Sagala (2003:57) menyebutkan ada beberapa syarat yang diperlukan agar peserta didik berhasil belajar antara lain :

1. Kemampuan berpikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif.
2. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran.
3. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai potensinya.
4. Menguasai bahan - bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan pelajaran di sekolah menjadi lanjutannya.
5. Menguasai salah satu bahasa asing terutama Bahasa Inggris.
6. Stabilitas psikis (tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan seksual).
7. Kesehatan jasmani.
8. Lingkungan yang tenang.
9. Kehidupan ekonomi yang memadai.
10. Menguasai teknik belajar di sekolah dan di luar sekolah.

2. Makna Mengajar

Menurut Usman dan Setiawati (1993:6) mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa.

Prinsip – prinsip mengajar menurut Sagala (2003 :150) antara lain :

1. Prinsip perkembangan
Pada prinsipnya siswa yang sedang belajar di kelas berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang yang berarti perubahan. Oleh karena itu, pada waktu memilih bahan dan metode mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan anak.
2. Prinsip perbedaan individu
Seorang guru yang menghadapi 30 orang siswa di kelas sebenarnya bukan hanya menghadapi ciri – ciri satu kelas siswa, melainkan juga menghadapi 30 perangkat

ciri – ciri siswa. Dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam memberikan tugas – tugas dan pembimbingan belajar guru harus dapat memahami dengan benar ciri – ciri para siswanya tersebut.

3. Prinsip minat dan kebutuhan anak

Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri – sendiri. Dalam hal mengajar, bahan ajaran dan penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut.

4. Prinsip aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran

Setiap perbuatan termasuk perbuatan belajar didorong oleh sesuatu atau beberapa motif. Seorang guru harus memiliki perencanaan pengajaran untuk membangkitkan belajar para siswa.

Model mengajar yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar menurut Sagala (2003:179) yaitu :

1. Model interaksi sosial

Metode mengajar yang dikembangkan dalam model ini adalah diskusi, *problem solving*, metode simulasi, bekerja kelompok dan metode lain yang menunjang berkembangnya hubungan sosial siswa. Model ini berorientasi kepada siswa dengan mengembangkan sikap demokratis artinya sesama mereka mampu saling menghargai meskipun diantara mereka ada perbedaan.

2. Model pembelajaran alam sekitar

Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak – banyaknya agar anak aktif, tidak hanya duduk, dengar dan mencatat. Pengajaran ini memberikan pengajaran totalitas karena menarik minat siswa dengan segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambilkan dari

alam sekitarnya. Selain itu juga memberi anak bahan persepsi intelektual yang kukuh dan tidak verbalitas.

3. Model pembelajaran pusat perhatian

Model ini mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi cara mengajar agar perhatian para siswa tetap terpusat pada bahan ajaran. Peluang untuk memvariasikan pengajaran terbuka luas dengan kemajuan teknologi, hal ini menyebabkan upaya menarik minat belajar menjadi lebih besar.

4. Model pembelajaran sekolah kerja

Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan ketrampilan dalam pendidikan. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu.

5. Model pembelajaran individu

Pada model pembelajaran secara individual, guru memberikan bantuan belajar kepada masing – masing pribadi siswa sesuai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Perilaku pembelajaran individual ini guru akan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masing – masing individu siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswanya.

6. Model pembelajaran klasikal

Model ini merupakan kegiatan penyampaian pelajaran kepada sejumlah siswa yang biasanya dilakukan oleh pengajar dengan berceramah di kelas. Hal ini cenderung menempatkan siswa dalam posisi pasif sebagai penerima bahan ajaran.

7. Model konstruktivis dalam mengajar

Model ini menekankan bahwa anak – anak memperoleh banyak pengetahuan di luar sekolah dan pendidikan seharusnya memperhatikan hal itu dan menunjang proses alamiah ini.

8. Model pengembangan sistem pengajaran

Model ini merupakan prosedur belajar dan mengajar yang dipandang dari sudut sistem sehingga mengajar itu menunjukkan suatu sistem yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam pembelajaran.

Sagala (2003:196) menyebutkan bahwa terdapat pendekatan dalam model mengajar antara lain:

1. Pendekatan Personal

Pendekatan ini merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berfikir ilmiah dimana menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam memecahkan masalah. Siswa betul – betul ditempatkan sebagai subyek yang belajar. Peranan guru adalah pembimbing dan fasilitator belajar.

2. Pendekatan tingkah laku

Dalam pendekatan ini langkah guru mengajar adalah sebagai berikut : (a) guru menyajikan stimulus belajar pada siswa; (b) mengamati tingkah laku siswa dalam menanggapi stimulus yang diberikan oleh guru; (c) memberikan latihan – latihan kepada siswa dalam memberikan respon

terhadap stimulus; (d) memperkuat respon siswa yang dipandang paling tepat terhadap jawaban dari stimulus.

3. Makna Belajar Mengajar

Usman dan Setiawati (1993:14) menyebutkan hakekat belajar mengajar adalah sebagai berikut :

1. Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
2. Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media teknologi yang tetap.
3. Program belajar mengajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem.
4. Proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
5. Pembentukan kemampuan profesional memerlukan pengintegrasian fungsional antara pribadi dan praktik serta materi dan metodologi penyampaianya.
6. Pembentukan kemampuan profesional memerlukan pengalaman lapangan yang bertahap mulai dari pengenalan medan, latihan ketrampilan terbatas sampai dengan pelaksanaan dan penghayatan tugas – tugas kependidikan secara langsung dan aktual.
7. Kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan profesional adalah peragaan penguasaan kemampuan.
8. Materi pengajaran serta sistem penyampaianya selalu berkembang.

Adapun pendekatan – pendekatan yang perlu ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam strategi belajar mengajar menurut Usman dan Setiawati (1993:77) antara lain :

1. Ketrampilan Proses

Pendekatan ketrampilan proses sebagai pendekatan yang menekankan pada penumbuhan dan pengembangan sejumlah ketrampilan tertentu pada diri peserta

didik agar mereka mampu memproses informasi sehingga ditemukan hal – hal yang baru yang bermanfaat baik berupa fakta, konsep, maupun pengembangan sikap dan nilai.

2. Cara belajar siswa aktif

Pendekatan ini merupakan strategi belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal.

3. Belajar tuntas

Belajar tuntas adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pelajaran baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan kata lain apa yang dipelajari siswa dapat dikuasai sepenuhnya.

4. Diagnostik kesulitan belajar

Pendekatan ini merupakan segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar, faktor – faktor yang menyebabkannya serta cara menetapkan kemungkinan – kemungkinan mengatasinya baik secara kuratif (penyembuhan) maupun secara preventif (pencegahan) berdasarkan data dan informasi yang seobjektif dan selengkap mungkin.

5. Pengajaran remedial

Pengajaran ini merupakan bentuk pengajaran yang membuat menjadi baik. Proses pengajaran bertujuan agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang sebaik – baiknya. Jika ternyata hasil yang dicapai tidak memuaskan, ini berarti siswa masih dipandang belum mencapai hasil belajar yang diharapkan sehingga masih diperlukan proses pengajaran yang dapat membantu agar tercapai hasil yang diharapkan.

6. Pengajaran pengayaan

Pendekatan ini merupakan kegiatan tambahan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya.

Strategi dalam belajar mengajar menurut Djamarah dan Zain (2002:5) meliputi hal – hal berikut :

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.
2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.
3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4. Menetapkan norma – norma dan batas minimal keberhasilan serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.

Arindawati dan Huda (2004:77) menyebutkan kegiatan belajar mengajar di tingkat Sekolah Menengah dilandasi oleh prinsip – prinsip sebagai berikut

1. Berpusat pada peserta didik.
2. Mengembangkan kreativitas peserta didik.
3. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang.
4. Mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai.
5. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.
6. Belajar melalui berbuat.

Berbagai sistem belajar mengajar yang berkembang akhir – akhir ini menurut

Djamarah dan Zain (2002 : 21) antara lain :

1. *Enquiry – Discovery Learning*, yaitu sistem belajar mengajar dimana guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah.
2. *Ekspository Learning*, yaitu guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi dan sistematis sehingga anak didik tinggal menyimak saja secara tertib dan teratur.
3. *Mastery Learning*, yaitu guru harus mengusahakan upaya – upaya yang dapat mengantarkan kegiatan anak didik ke arah tercapainya penguasaan penuh terhadap bahan pelajaran yang diberikan.
4. *Humanistic education*, yaitu guru hendaknya jangan membuat jarak terlalu tajam dengan siswanya dan dapat menempatkan diri berdampingan dengan siswa yang selalu siap menjadi konsultan yang berbicara.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dalam kegiatan belajar mengajar yaitu suatu kegiatan siswa dalam memperoleh pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang diperoleh di luar sekolah yang disajikan oleh guru.

D. Kegiatan luar sekolah

Dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah terdapat dua macam kegiatan menurut Suryosubroto (1997:270) antara lain :

1. Kegiatan ekstra kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Selain itu, kegiatan ekstra kurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa misalnya olah raga, kesenian, berbagai macam ketrampilan dan kepramukaan.

2. Kegiatan Ko Kurikuler

Kegiatan ini berupa mempelajari buku – buku pelajaran tertentu, mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan dapat berbentuk melakukan kegiatan beberapa hari di luar sekolah.

Selain itu, kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dapat berupa kegiatan karya wisata untuk meninjau tempat tertentu atau obyek yang lain. Hal itu bukan sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan dengan melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari / menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu,

suatu bengkel mobil, toko serba ada, suatu peternakan atau perkebunan, museum dan sebagainya.

Menurut Roestiyah (2001:85) teknik karya wisata ini digunakan karena memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Diharapkan siswa dapat memperoleh pengetahuan langsung dari obyek yang dilihatnya.
2. Dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang
3. Dapat bertanya jawab sehingga mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum.
4. Mereka bisa melihat, mendengar, meneliti dan mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran.

Kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yang lain yaitu dengan teknik penyajian kerja lapangan. Dimana menurut Roestiyah (2001:88) teknik penyajian kerja lapangan ialah cara mengajar dengan jalan mengajak siswa ke suatu tempat di luar sekolah yang bertujuan tidak hanya sekedar mengadakan observasi atau peninjauan saja tetapi langsung terjun berpartisipasi ke lapangan kerja agar siswa dapat menghayati sendiri serta dapat mengadakan penyelidikan dan dapat bekerja sendiri di dalam pekerjaan yang ada di masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh siswa dengan teknik penyajian kerja lapangan ini adalah diantaranya siswa mendapat kesempatan untuk langsung aktif bekerja di lapangan sehingga memperoleh pengalaman langsung dalam bekerja. Juga mereka akan menemukan pengertian / pemahaman dari pekerjaan itu baik mengenai kebaikan

atau kekurangannya. Maka bila ada kesulitan ia bisa mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Selain teknik penyajian kerja lapangan, kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dapat dilakukan dengan latihan. Seorang siswa perlu memiliki ketangkasan atau ketrampilan dalam sesuatu misalnya dalam lari cepat, atletik, berenang atau berkebun. Sebab itu di dalam proses belajar mengajar perlu diadakan latihan untuk menguasai ketrampilan tersebut. Maka salah satu teknik penyajian pelajaran untuk memenuhi tersebut ialah teknik latihan atau *drill*. Menurut Roestiyah (2001:125) latihan atau *drill* adalah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan – kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Teknik ini memang banyak digunakan untuk pelajaran olah raga. Dalam hal ini banyak cabang olah raga yang memerlukan latihan khusus dan teratur serta pengawasan dari *trainer* yang baik.

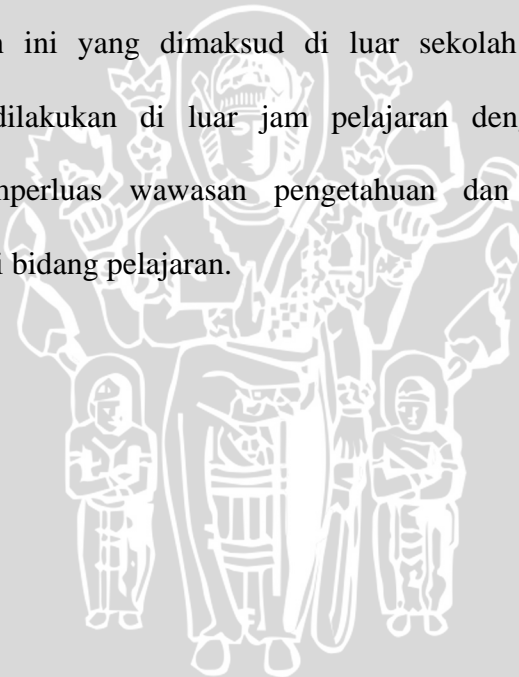
Teknik latihan ini biasanya digunakan untuk tujuan agar siswa memiliki ketrampilan gerak, mengembangkan kecakapan intelek, dan memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain.

Fungsi kegiatan luar sekolah bagi para siswa menurut Suryosubroto (1997:272) adalah mengembangkan minat dan bakat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif; dapat mengetahui,

mengenal serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya; meningkatkan kemampuan siswa ber aspek kognitif, efektif, dan psikomotor.

Selain itu, dalam usaha membina dan mengembangkan program kegiatan luar sekolah menurut Depdikbud dalam Suryosubroto (1997:276) adalah dengan memberikan materi kegiatan yang dapat memberikan pengayaan bagi siswa, sejauh mana mungkin tidak terlalu membebani siswa, memanfaatkan potensi alam lingkungan, memanfaatkan kegiatan - kegiatan industri dan dunia usaha

Dalam penulisan ini yang dimaksud di luar sekolah adalah merupakan kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan maksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dari berbagai bidang pelajaran.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang mengacu pada pendapat Moleong (1988:5) bahwa menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sejalan dengan definisi tersebut maka Kirk dan Miller dalam Moleong (1988:3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan tertuang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka-angka.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Dengan kata lain fokus sangat penting artinya untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong. Adapun menurut Moleong (1988:237) fokus penelitian merupakan suatu penetapan masalah dalam penelitian. Tingkat kesulitan justru ada pada penentuan fokus penelitian. Jika salah dalam menentukan fokus penelitian maka hasilnya akan menjadi tidak baik pula.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru, dengan melihat dari :
 - a. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Instansi Terkait (Dinas Pendidikan) mengenai Komite Sekolah.
 - b. Pelaksanaan yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru mengenai Komite Sekolah.
2. Peran serta orang tua murid dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru, yang dapat dilihat dari :
 - a. Tingkat partisipasi orang tua murid dalam menentukan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

- b. Bentuk partisipasi orang tua murid dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui pelaksanaan Komite Sekolah.
3. Upaya yang dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
 - a. Menyusun pengadaan sarana dan prasarana di luar sekolah, kegiatan pembelajaran karya wisata dan kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya.
 - b. Mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah.
 - c. Melakukan program kerjasama dengan pihak luar sekolah.
4. Faktor yang menghambat pelaksanaan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah
 - a. Faktor Intern
Faktor penghambat yang berasal dari dalam sekolah
 - b. Faktor Ekstern
Faktor penghambat yang berasal dari luar sekolah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari obyek penelitian, sedangkan situs penelitian adalah obyek yang

akan dilakukan suatu penelitian. Berkaitan dengan hal yang dimaksud, maka lokasi penelitian adalah Kabupaten Sidoarjo sedangkan situs penelitiannya adalah SMP Negeri I Waru.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (1988:112) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan menggunakan sumber data yang terdiri dari :

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 1983:93). Dengan demikian peneliti melakukan penelitian pada sumber pertama dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber pertama tersebut adalah :
 - a. Kepala Sub Dinas pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sidoarjo.
 - b. Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru.

- c. Guru SMP Negeri I Waru.
 - d. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru.
 - e. Orang tua murid SMPN I Waru.
2. Data Sekunder merupakan data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen (Suryabrata, 1983 :93). Dokumen – dokumen tersebut diambil dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan juga pada sekolah yang dipilih dalam penelitian ini (SMP Negeri I Waru).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Tahap pertama, peneliti mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 1 Waru untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan Komite Sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya dan SMP Negeri 1 Waru pada khususnya.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)

Tahap kedua ini lebih memfokuskan pada pengenalan dan melakukan pendekatan-pendekatan baik formal maupun informal antara peneliti dengan pihak terkait.

3. Pengumpulan data (*logging in data*)

Dalam tahap ketiga ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. *Interview*, teknik ini sering disebut wawancara, pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan informan;
- b. Observasi, yaitu pengamatan langsung kegiatan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti;
- c. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen pengumpul data sebagai upaya untuk mengumpulkan data, adalah :

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indra untuk melihat atau mengamati berbagai obyek dan kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Catatan lapangan (*field note*), yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti saat mengadakan pengamatan dan wawancara.

G. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, sebelum diinterpretasikan lebih dahulu memerlukan pemrosesan, yaitu dilakukan dengan menggunakan analisa data.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1988 :15) menyatakan bahwa analisa terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

1. Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data.
2. Penyajian data adalah merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi, dalam arti meninjau ulang catatan – catatan lapangan dengan maksud agar data – data yang diperoleh valid.

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan prosesnya saling berulang secara interaktif serta dapat terjadi selama sesudah pengumpulan data terjadi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Instansi Pelaksana Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru

a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

1) Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

• Kedudukan

Adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

• Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan.

• Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- b) Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, SMU, dan SMK atau yang sederajat;
- c) Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang meliputi RA/BA/TA, MI, MTs, dan MA;
- d) Pengaturan dan pengawasan penerimaan peserta didik sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis, uang sekolah, ijazah, dan perpustakaan sekolah;
- e) Pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- f) Pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan kesiswaan di sekolah-sekolah serta kerja sama dengan instansi terkait;
- g) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan dinas;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Adapun visi dan misi penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sidoarjo yaitu :

• Visi Pendidikan

Visi penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah terwujudnya pendidikan sebagai sistem pelayanan pendidikan yang handal dalam membantu pemberdayaan anak menjadi manusia yang mandiri.

• Misi Pendidikan

Adapun penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa misi, antara lain :

- a) Memperluas jaringan pendidikan.
- b) Memberikan pelayanan pendidikan yang prima sesuai dengan kebutuhan.
- c) Meningkatkan mutu pendidikan.
- d) Mengupayakan inovasi dan desiminasi pendidikan

3) Potensi Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

a) Kelembagaan

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo cukup kompleks, berjumlah 1789 baik lembaga negeri maupun swasta dari tingkatan TK sampai MA. Keberadaan lembaga pendidikan ini diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan pendidikan warga Sidoarjo. Secara detail, dapat dilihat dalam Tabel:

**TABEL 1
KELEMBAGAAN**

No	Jenjang	Jumlah lembaga		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	700	700
2	RA/BA	-	100	100
3	SD	454	25	479
4	MI	2	236	238
5	SMP	44	50	94
6	MTs	1	77	78
7	SMA	12	30	42
8	SMK	4	17	21
9	MA	2	35	37
Jumlah		502	1287	1789

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

**TABEL 2
DATA SMPN**

Nama Kecamatan	Nama Sekolah
Sidoarjo	SMPN I, SMPN II, SMPN III, SMPN IV, SMPN V, SMPN VI
Buduran	SMPN I, SMPN II
Candi	SMPN I, SMPN II, SMPN III
Porong	SMPN I, SMPN II, SMPN III
Krembung	SMPN I, SMPN II
Tulangan	SMPN I
Tanggulangin	SMPN I, SMPN II
Jabon	SMPN I, SMPN II
Krian	SMPN I, SMPN II, SMPN III
Balombang	SMPN I, SMPN II
Tarik	SMPN I, SMPN II
Prambon	SMPN I
Wonoayu	SMPN I, SMPN II
Taman	SMPN I, SMPN II, SMPN III
Sukodono	SMPN I, SMPN II
Gedangan	SMPN I, SMPN II
Waru	SMPN I, SMPN II, SMPN III, SMPN IV
Sedati	SMPN I, SMPN II

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

**TABEL 3
DATA SMAN**

Nama Sekolah	Alamat
SMAN I Sidoarjo	Jl. Jenggolo 2A
SMAN II Sidoarjo	Jl. Kutuk Sidokare
SMAN III Sidoarjo	Jl. Sultan Agung 9
SMAN IV Sidoarjo	Jl. Raya Suko
SMAN I Porong	Jl. Bhayangkari
SMAN I Krembung	Ds. Mojaruntut
SMAN I Krian	Jl. S. Pry. Sudarmo
SMAN I Taman	Jl. Sawunggaling 2 Jemundo
SMAN I Waru	Jl. Brantas Barito Wisma Tropodo
SMAN I Gedangan	Jl. Raya Sedati
SMAN I Wonoayu	Ds. Pagerngumbuk
SMA Negeri 1 Tarik	Ds. Janti

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

**TABEL 4
DATA SMKN**

Nama Sekolah	Alamat
SMKN I Sidoarjo	Jl. Monginsidi
SMKN I Buduran	Jl. Jenggolo 1 B
SMKN II Buduran	Jl. Jenggolo 2 A
SMKN III Buduran	Jl. Jenggolo 1 C

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

Berdasarkan keempat tabel di atas, diketahui bahwa lembaga pendidikan swasta lebih banyak dari pada lembaga negeri, yaitu berjumlah 1287 lembaga. Keberadaan lembaga swasta ini diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang setara bahkan bisa melampaui lembaga negeri.

b) Peserta Didik

Penduduk usia sekolah yang menempuh jalur pendidikan dari TK sampai MA di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 233.578 orang dan tersebar di berbagai lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Secara terperinci dapat diketahui dari tabel 5:

TABEL 5
DATA PESERTA DIDIK

No	Jenjang	Jumlah Murid		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	28.100	28.100
2	RA/BA	-	8.000	8.000
3	SD	61.182	5.859	67.041
4	MI	402	48.798	49.200
5	SMP	18.066	10.141	28.207
6	MTs	725	19.540	20.265
7	SMA	6.831	9.200	16.031
8	SMK	828	6.206	7.034
9	MA	1.060	8.640	9.700
Jumlah		89.254	144.324	233.578

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

Banyaknya peserta didik di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan penanganan yang maksimal oleh Dinas Pendidikan melalui sekolah yang bersangkutan, sehingga dapat dihasilkan lulusan yang berkompeten yang diorientasikan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

c) Ketenagaan

Tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 17.931 orang. Keberadaan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” ini terus diusahakan tingkat kesejahteraannya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan bentuk

penghargaan terhadap jasa mereka sebagai pendidik dalam mencetak generasi penerus bangsa yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa di masa depan.

Secara terperinci, keberadaan guru dapat dilihat dalam tabel 6 :

TABEL 6
GURU MENURUT TEMPAT TUGASNYA

No	Jenjang	Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	1.448	1.448
2	RA/BA	-	446	446
3	SD	3.428	352	3.780
4	MI	34	3.890	3.924
5	SMP	1.085	1.257	2.342
6	MTs	41	2.486	2.527
7	SMA	454	1.011	1.465
8	SMK	68	535	603
9	MA	102	1.294	1.396
Jumlah		5.218	12.713	17.931

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006

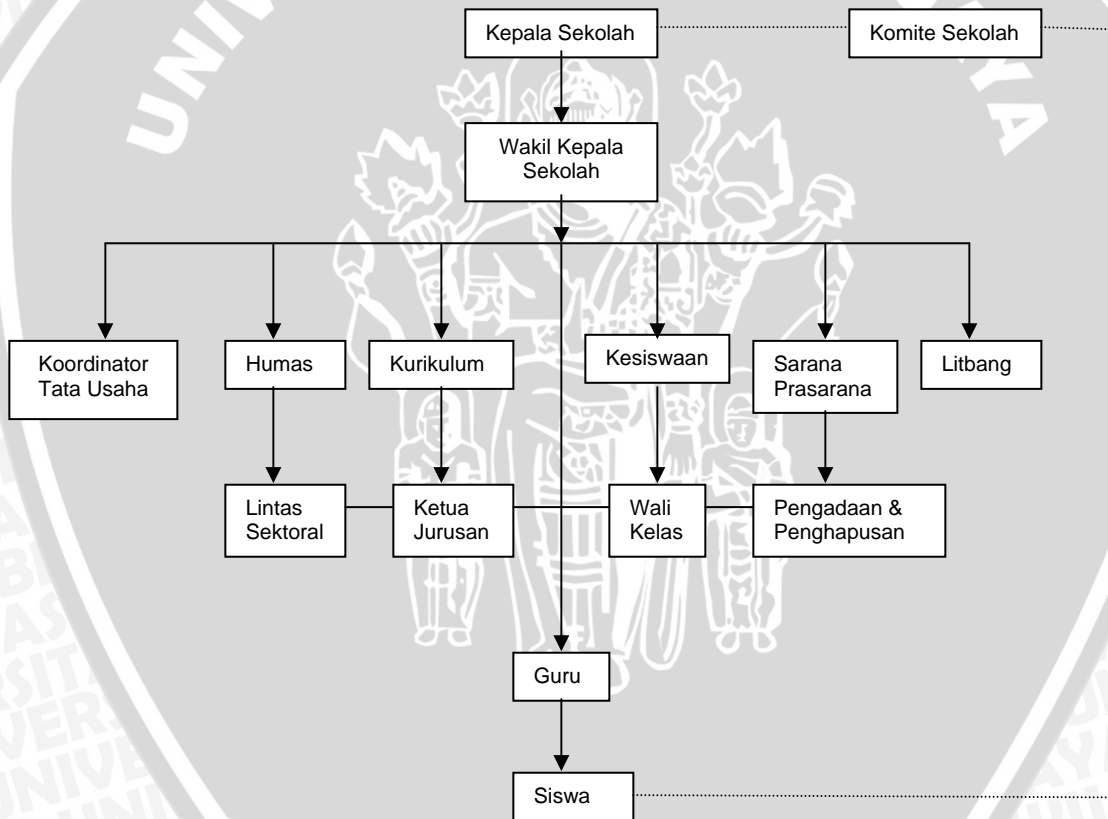
b. Gambaran Umum SMPN I Waru

1) Sejarah Berdirinya

SMPN I Waru merupakan sekolah favorit di wilayah Kecamatan Waru. Semua orang tua murid yang berada di wilayah Kecamatan Waru berlomba – lomba untuk dapat menyekolahkan anaknya ke SMPN I Waru. Sekolah ini terletak pada Jalan Kepuh Kiriman Waru. SMPN I Waru didirikan berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 69 tahun 1983 mengenai pendirian ijin bangunan dengan NIB : 12.10.18.11.00094. Luas tanah SMPN I Waru adalah 9.975 m² dan luas bangunan seluruhnya adalah 3.250 m² dengan status kepemilikan tanah milik

Depdiknas Prop. Jawa Timur. Sedangkan Kepala Sekolah yang ditugaskan Pemerintah untuk membentuk Komite Sekolah adalah Bapak Drs. Fathurrahman M.,M.Sc.dengan pendidikan terakhir S-2 jurusan Manajemen Humaniora. Adapun mengenai penjelasan mengenai struktur organisasi SMPN I Waru dapat dijelaskan di bawah ini:

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI SMPN I WARU



Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

2) Keadaan Peserta Didik

Berdasarkan dokumentasi tahun 2006, peserta didik SMP Negeri 1 Waru berjumlah 1050 orang. Adapun perinciannya sebagai berikut:

TABEL 7
DATA PESERTA DIDIK SMPN I WARU
TAHUN AJARAN 2006/2007

KELAS	JUMLAH KELAS	JUMLAH SISWA
VII	9	360
VIII	9	345
IX	9	345
JUMLAH	27	1.050

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada kelas VII (kalau sebelumnya disebut kelas I dan sekarang merupakan kelanjutan dari SD kelas I sampai dengan VI, kemudian kelanjutannya kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX di SMP), setiap kelas dihuni 40 murid, kelas VIII dan kelas IX masing – masing dihuni 38 murid dan tiga kelas lainnya masing – masing 39 murid

3) Kondisi OrangTua Murid

SMP Negeri 1 Waru berdiri di tengah kehidupan masyarakat yang bervariasi. Berikut penuturan salah satu guru SMPN I Waru bernama Dra. Sri Utami pada tanggal 8 Juli 2006:

“Orang tua murid SMPN I Waru yang berjumlah 1.050 orang ini rata- rata kebanyakan menengah ke atas. Hanya sekitar 11-14 % saja yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu. Dengan keadaan seperti ini dapat menunjang kegiatan belajar mengajar karena orang yang tidak mampu mendapat subsidi silang dalam pembayaran SPP.”

Sesuai dengan yang disampaikan narasumber bahwa saat ini keadaan orang tua murid termasuk menengah ke atas sehingga dapat mendukung Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Dukungan orang tua murid sangat besar dan memiliki arti penting dalam kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi setiap peserta didik di sekolah. Karena itu segenap aspirasi dan keinginan dari orang tua murid yang dimunculkan dapat dijadikan bahan masukan dan koreksi dalam setiap perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaan dan evaluasi. Kontrol yang baik dari orang tua murid terhadap kebijakan yang dilakukan akan berdampak pada kemajuan.

4) Kondisi Guru dan Tenaga Administrasi

Hal yang tidak kalah penting dari suksesnya sebuah pendidikan adalah keberadaan guru ataupun tenaga pengajar serta tenaga pendukung lain yang dapat memperlancar proses belajar mengajar seperti keberadaan penjaga sekolah. Karena sebaik dan selengkap apapun bangunan fisik sekolah dan fasilitas yang dimiliki tanpa didukung oleh sumber daya tenaga pengajar yang baik, maka proses kemajuan pendidikan juga akan mengalami kendala.

Guna mendukung proses pendidikan di sekolah, jumlah guru mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Waru, sudah sesuai kebutuhan serta memenuhi kualifikasi (mayoritas sesuai dengan latar belakang pendidikan), yaitu berjumlah 72 guru.

Dimana jumlah guru tetap 60 orang dan jumlah guru tidak tetap 12 orang. Sedangkan tenaga administrasi sejumlah 13 orang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

**TABEL 8
DATA GURU**

No.	Mata Pelajaran	Jumlah	Keterangan
1	Pendidikan Agama	5	2 Agama Islam, 1 Agama Kristen, 1 Agama Katolik
2	Kewarganegaraan	3	-
3	Pendidikan Jasmani	4	-
4	Pendidikan Kesenian	4	-
5	Bahasa Indonesia	9	-
6	Bahasa Inggris	6	-
7	Bahasa Jawa / Ketrampilan (Mulok)	3	-
8	IPS (Pengetahuan Sosial)	14	-
9	Matematika	9	-
10	IPA / Sains (Pengetahuan Alam)	8	-
11	Bimbingan Konseling / BK	4	-
12	Teknologi Informasi Komputer	3	-
	JUMLAH	72	

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

**TABEL 9
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN GURU**

No	Pendidikan	Jumlah
1	PGSLP	1
2	Sarjana Muda	2
3	D 2	3
4	D 3	7
5	S 1	57
6	S 2	2

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

TABEL 10
KONDISI KARYAWAN

No.	Keadaan Pegawai	Jumlah
1	Tata Usaha	7
2	Pesuruh Tetap	-
3	Pesuruh Tidak Tetap	3
4	Satpam Tetap	2
5	Satpam Tidak Tetap	1
	Jumlah	13

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Dari tabel di atas nampak bahwa komposisi antara masing – masing mata pelajaran berbeda dengan jumlah guru yang mengajarnya. Hal ini disebabkan karena tuntutan masing – masing mata pelajaran itu sendiri. Seperti halnya mata pelajaran IPS yang dipegang 14 guru disebabkan mata pelajaran IPS terdiri beberapa pelajaran seperti Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan muatan lokal (mulok) untuk pelajaran Bahasa Jawa yang dalam hal ini dipegang oleh tiga guru merupakan mata pelajaran yang khusus berlaku untuk SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, dari latar belakang pendidikan dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga pengajar di SMPN 1 Waru berijasah Sarjana Strata 1. Sedangkan yang berpendidikan PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) hanya 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya tenaga pengajar sudah baik dan memenuhi standar kualitas untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada para muridnya.

Sedangkan tenaga pengajar untuk kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung kegiatan belajar mengajar di luar sekolah kebanyakan berasal dari luar namun tenaga pengajar tersebut merupakan alumni SMPN I Waru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang guru bernama Drs. Asmaul Chusna dalam wawancara pada tanggal 8 Juli 2006 berikut ini :

“Dalam kegiatan ekstrakurikuler, SMPN I Waru menggunakan tenaga pengajar yang kebanyakan berasal dari luar namun mereka merupakan alumni SMPN I Waru.”

Berikut dapat dilihat daftar pengajar kegiatan ekstra kurikuler tahun ajaran 2006/2007.

TABEL 11
TENAGA PENGAJAR KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

No.	Jenis Ekstrakurikuler	Nama tenaga pengajar
1	Sepak Bola	Syamsuddin, S.Pd
2	Bola Voli	Sulaeman
3	Seni Tari	Sukartini, S.Pd, M.Pd
4	Baca Tulis Al-Quran	Mas Hasan, M.Ag
5	Karate	Teguh
6	PMR	Meilia
7	Pramuka	Erick Setiawan, Rudi, Muclis, Djammah, S.Pd
8	Bulu tangkis	Yuli Achmadi
9	Seni lukis	M. Harun, S.Pd

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Semua unsur di atas tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam satu kesatuan agar terselenggaranya pelayanan pendidikan secara maksimal. Di sinilah letak peran dan tanggung jawab seluruh warga sekolah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita SMP Negeri 1 Waru.

5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 1 Waru cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Secara detail, sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Waru meliputi :

TABEL 12
SARANA DAN PRASARANA

No.	Jenis Bangunan	Jumlah
1	Ruang Kepala Sekolah	1
2	Ruang Tata Usaha	1
3	Ruang Staff	1
4	Ruang Preparasi Guru	1
5	Ruang Teori	27
6	Aula (Ruang Serba Guna)	1
7	Laboratorium Komputer	1
8	Laboratorium Pengetahuan Alam	1
9	Laboratorium Bahasa	1
10	Perpustakaan	1
11	Ruang BK	1
12	Ruang UKS	1
13	Gudang Alat – alat	1
14	Kamar Mandi Siswa	2
15	Kamar Mandi Guru	2
16	Mushollah	1
17	Tempat Sepeda Siswa	1
18	Rumah Penjaga Sekolah	4
19	Lapangan Upacara	1
20	Lapangan Basket	1
21	Lapangan Bola Voli	1
22	Koperasi Siswa	1
23	Koperasi Guru	1
24	Ruang OSIS	1
25	Kantin	6
26	Sanggar Pramuka	1

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Selama ini fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar baik kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Dan dari daftar diatas dapat diketahui pula adanya beberapa sarana dan fasilitas yang masih kurang jumlahnya atau tidak sebanding dengan jumlah siswa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang guru bernama Drs. Asmaul Chusna pada tanggal 8 Juli 2006:

“Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Waru baik di sekolah maupun di luar sekolah belum cukup untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Semisal Laboratorium Biologi kami belum memiliki sehingga percobaan untuk Biologi dilakukan di dalam kelas. Selain itu, lapangan bola voli yang kami miliki tidak cukup menampung keinginan para murid untuk menekuni bola voli.”

6) Visi dan Misi SMP Negeri 1 Waru

Sebagai acuan dalam meraih target dan sasaran pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, maka SMP Negeri 1 Waru mengemban visi dan misi sekolah.

Adapun visi dan misi sekolah adalah seperti di bawah ini.

- Visi Sekolah

Berwawasan global, unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa.

Indikator visi :

- a. Unggul dalam pengembangan desain silabus pembelajaran berbasis kecakapan hidup.
- b. Terwujudnya sistem yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

- Misi Sekolah

- a. Mewujudkan pengembangan standar kompetensi, kompetensi dasar, pemetaan sistem berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- b. Mewujudkan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- c. Mewujudkan pengembangan beragam strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- d. Mewujudkan pengembangan sistem penilaian berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- e. Mewujudkan pengembangan bahan atau sumber pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- f. Mewujudkan pengembangan program pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- g. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

- h. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- i. Mewujudkan pengembangan fungsi – fungsi pengelolaan sekolah sesuai standar nasional pendidikan.
- j. Mewujudkan pengembangan kewirausahaan sekolah.
- k. Mewujudkan peningkatan perolehan nilai UAN.

7) Prestasi siswa SMPN I Waru

Indikator sekolah dikatakan berhasil atau favorit adalah prestasi yang diraih sekolah tersebut. Dalam hal ini Komite Sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah cukup berhasil membuat para siswa SMP Negeri I Waru meraih prestasi yang cukup banyak pada tahun 2004-2006. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai membuat para siswa terpacu untuk meraih prestasi yang terbaik. Berikut ini data – data prestasi yang diraih siswa SMP Negeri I Waru pada tahun 2004 – 2006.

TABEL 13
DATA PRESTASI MURID SMPN I WARU
BIDANG NON AKADEMIS TAHUN 2004 – 2006

No.	Jenis Lomba	Prestasi	Penyelenggara
1	Lomba Jelajah Medan Pria	Juara I (2004)	Telkom Divre V Jatim
2	Lomba Lintas Kota Penggalang Putra	Juara I (2004)	HUT RI 59 Kab. Sidoarjo
3	Lomba Lintas Kota Penggalang Putri	Juara I (2004)	HUT RI 59 Kab. Sidoarjo
4	Bulu tangkis Putri	Juara I (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
5	Bulu tangkis Putra	Juara I (2004) Pemain terbaik	Untung Surapati Cup se-Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya
6	Seni Tari	3 penyaji terbaik (2004)	Pekan seni pelajar Kab. Sidoarjo
7	Lomba Tari Kreasi Baru	Juara I (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
8	Lomba Tari Kreasi Baru	Juara II (2004)	HUT RI 59 Kab. Sidoarjo
9	Tenis meja Putri	Juara II (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
10	Bulu tangkis Putri	Juara II (2004)	Amal In Action, Masjid Al – Muhajirin Tk. Kabupaten
11	Lomba Liga Guna	Juara I/Pi (2004) Juara II/Pa (2004)	Kwarda Jawa Timur
12	Lomba Survival dan Lintas Kota	Juara I/Pi (2004) Juara I/Pa (2004)	Kwarcab Sidoarjo
13	Festival Tari Remaja	5 penyaji terbaik (2005)	Panitia Pekan Seni Pelajar Propinsi Jatim di Madiun
14	Renang antar pelajar	Juara III /Pi (2005)	UNESA Surabaya
15	Tari Kreasi Baru	Juara Harapan(2005)	Pan Hari Jadi Kab Sidoarjo
16	Judo kelas 66 kg	Juara I/Pa (2005)	Panitia Porda KONI Kab. Sidoarjo
17	Tari Kreasi Baru	Juara II (2005)	PLN Wilayah Jawa Timur
18	Renang	Juara I (2005)	Panitia POPDA Kab. Sidoarjo
19	Seni Tari	3 Penyaji Terbaik (2006)	Panitia Festival Tari Remaja Jenjang SMP Kab. Sidoarjo
20	Lomba P3K Putri	Juara II (2006)	PMI Kab. Sidoarjo
21	Lomba Penggalang	Juara Umum (2005)	HUT Gudep J 1285, 1286 se-GERBANGKERTASUSILA
22	Lomba Gelanggang Galang	Juara I/Putri (2005)	UNAIR Surabaya
23	Lomba Gerak &Lagu	Juara III (2006)	PT. PLN Distribusi Jatim
24	Lomba Galang Pramuka	Juara II/Pria (2006)	MA Tanada Waru se-Sidoarjo dan Surabaya

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

TABEL 14
DATA PRESTASI MURID SMPN I WARU
BIDANG AKADEMIS TAHUN 2004 – 2006

No.	Jenis Lomba	Prestasi	Penyelenggara
1	Lomba Lukis	Juara II (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
2	Menyanyi Tunggal Putri Tk. SMP	Juara I (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
3	Menyanyi Tunggal Putra Tk. SMP	Juara II (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
4	Lomba Karya Tulis	Juara III (2004)	Kabupaten Sidoarjo
5	Lomba <i>Vocal Group</i>	Harapan I (2004)	Pakerin Musik SMK 9 Surabaya
6	Lomba Baca Puisi	3 Penyaji Terbaik (2004)	Pekan Seni Pelajar Kab. Sidoarjo
7	Lomba Lukis Caping	Juara I (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
8	Lomba Mendongeng	Juara II (2004)	HUT Kebun Binatang Surabaya
9	Lomba Menulis	Juara II (2004)	HUT Kebun Binatang Surabaya
10	Lomba Baca Puisi	Juara II (2004)	Amal In Action, Masjid Al-Muhajirin Tk. Kabupaten
11	Lomba Seni Patung	Juara II (2004)	Cabang Dinas Pendidikan Waru
12	<i>Story Telling</i> Tk. SMP	Juara I (2005)	Kabupaten Sidoarjo
13	Karya Ilmiah dan Teknologi	Juara II (2005)	SMK Negeri Sidoarjo
14	Mata Pelajaran (IPU)	Juara III (2005)	Se-GERBANGKERTASUSILA
15	Lomba Baca Puisi	5 Penyaji Terbaik (2005)	Pekan Seni Pelajar Propinsi Jatim

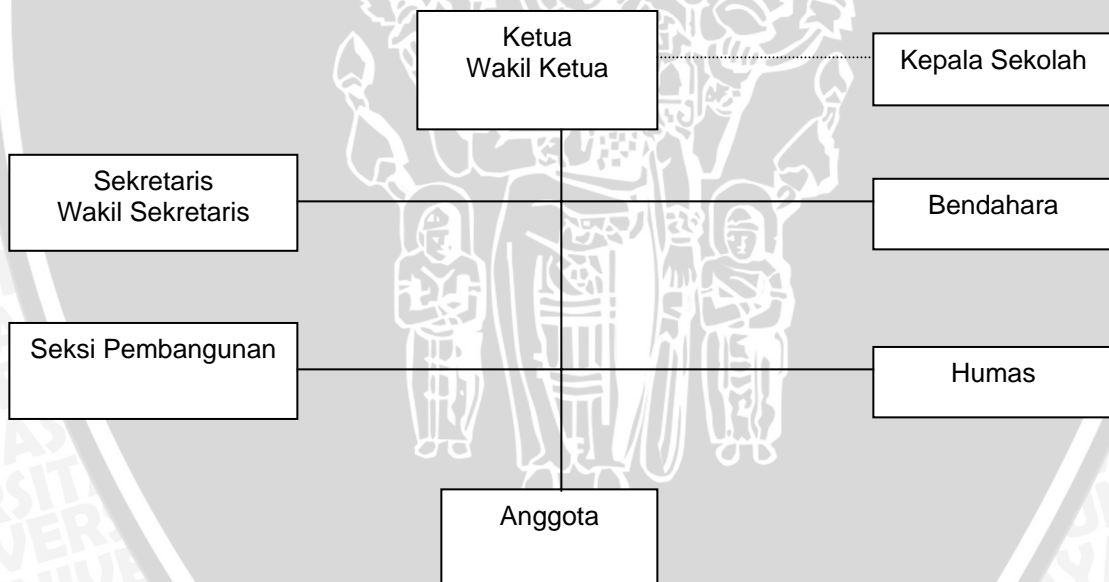
Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

8) Komite Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah maka tiap sekolah harus mempunyai Komite Sekolah. Dengan adanya Komite Sekolah maka dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan dan peran serta orang tua murid selaku pengguna jasa sekolah untuk memajukan sekolah dan memperhatikan pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, SMP Negeri I Waru membentuk Komite Sekolah dengan dikeluarkannya SK Kepala SMP Negeri I Waru No. 642/860/404.3.14.16.1/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pembentukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru Kabupaten Sidoarjo. Komite Sekolah ini diharapkan dapat membantu permasalahan dalam hal sarana dan prasarana untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar khususnya di luar sekolah. Berikut ini bagan Struktur Organisasi Komite Sekolah SMPN I Waru :

**BAGAN 2
STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE SEKOLAH SMPN I WARU**



Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Keterangan : Hubungan Koordinatif
 _____ Hubungan Instruktif

1. Ketua Komite Sekolah

Mempunyai tugas menyusun rencana program kerja Komite Sekolah bersama pengurus lain dan mengkomunikasikan kepada sekolah.

Disamping itu menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah, kebutuhan sekolah, dan persoalan yang dihadapi sekolah.

2. Wakil Ketua Komite Sekolah

Menyusun rencana program kerja Komite Sekolah bersama pengurus lain, membantu Ketua Komite Sekolah dan menjalankan tugas Ketua Komite Sekolah bila berhalangan.

3. Sekretaris Komite Sekolah

Menyusun agenda kerja dengan Ketua Komite Sekolah dan Seksi Pembangunan serta menyusun administrasi dan mengagendakan surat masuk dan keluar.

4. Bendahara Komite Sekolah

Menerima, membukukan dana dari bantuan masyarakat dan pengeluaran dana kepada sekolah atas persetujuan Komite Sekolah. Membuat laporan keuangan kepada Komite Sekolah, sekolah dan masyarakat atas persetujuan Ketua Komite Sekolah.

5. Seksi Pembangunan

Melaksanakan gagasan orang tua murid dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan kebijakan Komite Sekolah dan melaksanakan penarikan dana untuk kepentingan sekolah serta mencari potensi yang dapat membantu sekolah.

6. Humas

Mengkomunikasikan yang berkaitan dengan Komite Sekolah dan program kerja Komite Sekolah kepada sekolah, orang tua, masyarakat dan guru.

7. Anggota

Memberikan masukan, ide, gagasan pada Komite Sekolah serta melaksanakan program kerja Komite Sekolah dalam kaitan kemajuan sekolah

Adapun susunan pengurus Komite Sekolah SMP Negeri I Waru berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri I Waru Nomor : 642/860/404.3.14.16.1/2004 tanggal 14 Januari 2004 sebagai berikut :

TABEL 15
SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SMP NEGERI I WARU

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H.M Rifai, M.ag	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Dr. M. Dayat	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
3	Ir. Moh. Chosin, M.M	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	Drs. H. Praptomo, M.M	Wakil Sekretaris	Pemerhati Pendidikan
5	Drs. H. Wahib Haman	Bendahara	Tokoh Masyarakat
6	Hj. Lilik Nurlaili, S.Pd	Wakil Bendahara	Guru
7	Ir. Fathul Anam	Seksi Pembangunan	Orang Tua Siswa
8	Drs. Lasito	Seksi Pembangunan	Orang Tua Siswa
9	Dra. Sri Utami IN, S.Pd	Humas	Guru
10	Hasyim, S.Pd	Humas	Guru
11	Agus Nuryanto, SE	Anggota	Orang Tua Siswa
12	Drs. Asmaul Chusna R.	Anggota	Guru
13	Drs. Guntur Sumilih, MAPPSc	Anggota	Guru
14	Adri Pranoto Edy, S.Pd	Anggota	Guru

Sumber : SMP Negeri 1 Waru Tahun 2006

Kepengurusan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru mempunyai masa kerja selama 4 tahun. Tugas – tugas yang ada pada Komite Sekolah berdasarkan atas program – program dari kepala sekolah, guru serta orang tua murid SMP Negeri I Waru. Program – program itu meliputi pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah seperti ketrampilan, *studi tour*, seni dan kegiatan ekstra kurikuler.

2. Proses Implementasi Kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru

a. Pelaksanaan yang Dilakukan Oleh Instansi Terkait (Dinas Pendidikan) Mengenai Komite Sekolah

Dalam kebijakan pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002, di dalamnya memuat tentang pelaksanaan Komite Sekolah di tiap tingkatan sekolah yang menjadi program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu instansi yang terkait dengan masalah ini. Dalam wawancara pada tanggal 23 Juni 2006, Kasubdin Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan memberikan penjelasan sebagai berikut.

“Mengenai pelaksanaan Komite Sekolah di tiap sekolah Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan. Akan tetapi, Komite Sekolah di tiap sekolah antara yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang Komite Sekolahnya berjalan dengan baik dan ada yang hanya sekedar formalitas sehingga Komite Sekolahnya tidak berperan apa – apa dalam kelangsungan pendidikan sekolahnya. Oleh karena itu, kami sering mengadakan seminar atau *workshop* tentang Komite Sekolah agar Komite Sekolah di tiap tingkatan sekolah dapat bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan sekolahnya.”

Pembentukan Komite Sekolah khususnya di tingkat SMP di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib keberadaannya. Menyangkut kebijakan program kegiatan Komite Sekolah diserahkan pada masing – masing sekolah. Hal tersebut berdasarkan atas instruksi baik dari Dinas Pendidikan Pusat maupun Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

Berikut ini akan kami sajikan langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Langkah-langkah ini tertuang dalam kebijakan operasional dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- Kebijakan Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Adapun kebijakan operasional Dinas Pendidikan meliputi :

- 1) Menuntaskan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 3) Mengusahakan terbentuk dan berfungsinya Komite Sekolah pada semua lembaga dan Dewan Pendidikan pada kantor Dinas dan Cabang di seluruh Kabupaten Sidoarjo sebagai *partner* dalam pengambilan kebijakan;
- 4) Membenahi metodologi pembelajaran ke arah teori pembelajaran mandiri (dari behavioristik ke konstruktivistik);
- 5) Memberdayakan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) sebagai pendongkrak rendahnya angka partisipasi dan angka transisi;
- 6) Mengembangkan perpustakaan ;
- 7) Mengefektifkan pertemuan dan rapat-rapat dinas sebagai sarana pembelajaran;
- 8) Mengembangkan sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- 9) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan;

- Kegiatan Dinas Pendidikan

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- 1) Melaksanakan penataran;
- 2) Memantapkan tugas pengawas pendidikan;
- 3) Mengintensitaskan pembinaan pengawas kepada lembaga pendidikan dan personilnya di semua jenjang, negeri maupun swasta;
- 4) Memberikan insentif bagi semua tenaga kependidikan di semua jenjang baik negeri, swasta, formal, maupun nonformal;
- 5) Membangun RKB;
- 6) Membangun jaringan komunikasi antar lembaga;
- 7) Melaksanakan *droping* fasilitas pendidikan baik berupa peralatan lapangan olah raga dan seni, perpustakaan, laboratorium dll;
- 8) Membantu penyaluran *Block Grant* dari Dinas Pendidikan Pusat dengan persetujuan dari Komite Sekolah;
- 9) Memberikan bantuan keuangan;
- 10) Memberikan bantuan biaya minimal pendidikan bekerja sama dengan propinsi bagi seluruh keluarga miskin;
- 11) Meningkatkan dana bantuan operasional kepada seluruh lembaga pendidikan baik negeri, swasta, formal, maupun nonformal terutama pendidikan dasar;

- 12) Memberdayakan Komite Sekolah sebagai mediator masyarakat dan orang tua;
- 13) Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini;
- 14) Meningkatkan pembinaan kejar Paket A, B, dan C;

Semua langkah tersebut disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kepada lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo untuk segera dijabarkan dan direalisasikan sesuai kondisi sekolah masing-masing, termasuk SMP Negeri 1 Waru.

Untuk mendukung pelaksanaan Komite Sekolah yang telah digariskan oleh Dinas Pendidikan pusat maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melakukan peninjauan ke semua jenjang tingkatan sekolah. Dalam peninjauan tersebut Dinas Pendidikan Sidoarjo melihat apakah Komite Sekolah di sekolah tersebut ada dan berfungsi sebagaimana yang digariskan. Jika ada tapi tidak berfungsi Dinas Pendidikan Sidoarjo memberikan peringatan kepada sekolah tersebut agar dapat memfungsikan Komite Sekolahnya dan memberikan poin – poin arahan bagaimana Komite Sekolah dapat berjalan sesuai yang digariskan.

Diantaranya dengan memberikan pengarahan bahwa Komite Sekolah dibentuk dengan tugas yang tidak kalah mulianya. Mereka yang terlibat di dalamnya hendaknya orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melihat kemajuan sekolah tanpa

menghiraikan kondisi masyarakat. Komite Sekolah hendaknya menjauhkan diri dari persepsi masyarakat yang hanya bertugas memungut dana dan membebani orang tua.

Komite tetap harus komit pada tugasnya, yakni mengupayakan penggalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Mereka bertugas untuk mencari jalan keluar dari fenomena keterbatasan dana pemerintah dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan karyawan. Berkait dengan ini, diperlukan kecerdasan dan rasa kemanusiaan yang tinggi dari pengurus komite. Dengan adanya pengarahan tersebut diharapkan setiap elemen pendidikan baik guru, kepala sekolah, orang tua murid ikut terlibat dan merasa bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan anaknya.

Di SMP Negeri I Waru sendiri, ketentuan Dinas Pendidikan Sidoarjo direspon secara positif dan berusaha dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sekolah.

b. Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru

Mengenai Komite Sekolah

Setelah keluarnya perintah untuk segera membuat dan melaksanakan kebijakan Komite Sekolah, maka setiap sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah harus melakukan langkah aktif.

Komite Sekolah SMP Negeri I Waru bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan layanan serta kualitas pendidikan di SMP Negeri I Waru. Dalam melaksanakan kebijakan Komite Sekolah agar dapat menunjang kegiatan belajar

mengajar di luar sekolah, Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru di sekolahnya melakukan langkah-langkah secara bertahap yang bertujuan agar pelaksanaan Komite Sekolah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru dalam pelaksanaan Komite Sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. Fathurrahman M.Sc pada wawancara tanggal 8 Juli 2006 sebagai berikut.

“Ketika diinstruksikan untuk menjalankan Komite Sekolah, langkah pertama yang saya ambil adalah mengadakan pembicaraan dengan guru dan orang tua murid untuk memberitahukan pentingnya Komite Sekolah untuk menunjang kegiatan sekolah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.”

Mengenai pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru tentang Komite Sekolah, Ketua Komite Sekolah membenarkan langkah – langkah yang dilakukan Kepala Sekolah dalam pembentukan Komite Sekolah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa’i M.Ag sebagai berikut.

“Dalam pembentukan Komite Sekolah, Kepala Sekolah melakukan pembicaraan dengan guru dan orang tua murid untuk memberitahukan pentingnya Komite Sekolah untuk menunjang kegiatan sekolah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Setelah melakukan pendekatan, Kepala Sekolah membentuk kepengurusan Komite Sekolah dan Komite Sekolah membuat program – program yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Secara terperinci, langkah-langkah yang dilakukan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru dalam pelaksanaan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1) Langkah awal

- Melakukan pembicaraan dengan para guru untuk memberitahukan betapa pentingnya fungsi Komite Sekolah untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- Berbagi pengetahuan tentang Komite Sekolah kepada orang tua murid.
- Melakukan pembentukan Komite Sekolah secara bersama – sama dengan para guru, orang tua murid dan tokoh masyarakat.

2) Langkah Kedua

- Setelah menetapkan pengurus Komite Sekolah, Kepala Sekolah membuat SK terbentuknya Komite Sekolah.
- Kepala Sekolah memberikan penjelasan masing – masing tugas setiap pengurus Komite Sekolah sesuai yang digariskan oleh Dinas Pendidikan.
- Komite Sekolah membuat program – program untuk menunjang sarana dan prasarana yang kurang untuk kegiatan belajar mengajar baik di dalam sekolah maupun luar sekolah dengan berkoordinasi bersama Kepala Sekolah.
- Menyusun RAPBS bersama Komite Sekolah untuk disesuaikan dengan program Komite Sekolah dalam pembangunan sarana dan prasarana.

- Kepala sekolah, orang tua murid, dan Komite Sekolah melakukan pertemuan untuk menentukan sumbangan dana bagi Komite Sekolah dan membicarakan sasaran kegiatan yang ingin dilaksanakan berkaitan dengan pelajaran.
- Komite Sekolah memberikan subsidi silang dalam pembayaran SPP yaitu siswa yang orang tuanya mampu membayar lebih banyak daripada siswa yang tidak mampu bahkan bisa gratis

Selain langkah – langkah diatas, Komite Sekolah yang telah dibentuk dengan dikeluarkannya SK Kepala Sekolah mengenai pembentukan Komite Sekolah maka program yang dilakukan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain dengan mengadakan kegiatan ekstra kurikuler beserta sarana dan prasarananya, *study tour* maupun karya wisata, dan melaksanakan lomba seperti lomba pramuka tingkat kecamatan.

Semua langkah yang diambil oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru menunjukkan keseriusan pihak sekolah dalam melaksanakan Komite Sekolah agar segala tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Komite Sekolah dapat diraih.

3. Peran Serta Orang Tua Murid Dalam Menunjang Tugas – Tugas Komite

Sekolah di SMP Negeri 1 Waru

a. Tingkat Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menentukan Kebijakan yang Dapat Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta orang tua yang lebih optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah perlu mendapatkan dukungan utamanya dari orang tua murid. Partisipasi orang tua murid kepada sekolah untuk mendukung setiap penyelenggaraan pendidikan termasuk kegiatan luar sekolah tergolong tinggi. Mengenai hal tersebut, dalam wawancara pada tanggal 3 Agustus 2006 Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa'i M.Ag memberikan penjelasan sebagai berikut.

“SMP Negeri 1 Waru menganut sistem transparansi. Jadi, setiap kebijakan yang akan diaplikasikan selalu dikomunikasikan dengan orang tua murid dengan mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan orang tua murid. Rapat ini diadakan untuk memberikan gambaran kepada orang tua murid mengenai sistem pendidikan yang berlaku di sini dan meminta partisipasinya. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi orang tua tinggi”

Sejauh ini keikutsertaan orang tua murid dalam rangka pengambilan keputusan tentang program pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah di SMP Negeri I Waru terwujud dalam kegiatan rapat orang tua murid dan ikut serta terlibat dalam susunan pengurus Komite Sekolah.

Peranan orang tua murid sangat besar untuk memahami sekaligus memberikan pilihan kebijakan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yang akan diberlakukan.

Pada sekitar Bulan Agustus 2006 diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh tenaga pengajar, Komite Sekolah, beserta orang tua murid SMP Negeri 1 Waru, yang membahas tentang :

- 1) Prestasi SMP Negeri 1 Waru terkini, yang meliputi prestasi akademik dan non akademik;
- 2) Pembahasan dan penetapan besarnya sumbangan sukarela untuk menunjang pelaksanaan program Komite Sekolah;
- 3) Penyepakatan program-program pembangunan SMP Negeri 1 Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah;
- 4) Pembahasan mengenai keluhan para orang tua murid baik saran maupun kritik terhadap kegiatan belajar mengajar baik di sekolah dan luar sekolah.

b. Bentuk Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah Melalui Pelaksanaan Komite Sekolah

Pelaksanaan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah perlu mendapatkan dukungan utamanya dari orang tua murid. Partisipasi orang tua murid kepada sekolah untuk mendukung setiap penyelenggaraan

pendidikan baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun luar sekolah ditunjukkan dalam berbagai macam bentuk. Salah seorang orang tua murid SMP Negeri I Waru yang bernama ibu Tutik dalam wawancara pada tanggal 15 Juli 2006 memberikan pernyataan sebagai berikut.

“Sebagai orang tua, kami mendukung segala sesuatu yang ditawarkan oleh pihak sekolah asal masih relevan untuk kemajuan dunia pendidikan. Hanya saja bentuk bantuan yang bisa kami berikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tanpa dimintapun jika itu untuk kemajuan anak-anak kami siap membantu asalkan pihak sekolah mau memberitahu dan mengajak kami untuk bekerja sama.”

Di SMP Negeri I Waru peranan orang tua murid sangat besar artinya bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan. Beberapa bentuk partisipasi telah ditunjukkan oleh orang tua murid untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui Komite Sekolah, diantaranya adalah :

1. Renovasi gedung untuk menambah aula (ruang serba guna), ruang rapat guru, dan kantor Kepala Sekolah berkat bantuan orang tua murid.
2. Pembuatan lapangan bola voli, pembuatan RKB yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah juga berkat bantuan orang tua murid.
3. Dalam memberikan bekal ketrampilan kepada siswa maka pendidikan komputer diselenggarakan oleh sekolah dengan bantuan orang tua murid yang mewujudkan 20 unit komputer. Selain itu, orang tua murid juga memberikan bantuan berupa alat untuk membuat sepatu yang bekerjasama

dengan Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro sehingga diharapkan setiap murid mempunyai ketrampilan membuat sepatu.

5. Ikut *memback-up* setiap kegiatan yang diadakan OSIS. Tidak hanya itu, mereka juga mendampingi dalam mencari sponsor dan negoisasi kalau kita mengadakan acara, seperti pentas seni dan perlombaan.
6. Ikut memberikan saran tentang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
7. Memberikan bantuan uang dalam program subsidi silang dimana orang yang berkecukupan membayar SPP lebih besar sehingga orang yang tidak mampu membayar SPP lebih rendah bahkan gratis sehingga murid tersebut dapat melakukan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun luar sekolah.
8. Memberikan bantuan uang dan bahan makanan serta pakaian layak pakai untuk turut mendukung program sekolah dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
9. Memberikan bantuan dana untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah seperti *study tour* maupun studi wisata.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa'i M.Ag dalam wawancara pada tanggal 3 Agustus 2006.

“Gedung sekolah yang direnovasi adalah hasil bantuan dari wali murid. Juga 20 unit komputer yang saat ini dimanfaatkan oleh siswa mulai dari kelas VII sampai kelas IX adalah juga bantuan orang tua murid. Selain itu, alat untuk pembuatan sepatu yang bekerjasama dengan Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro

juga berkat bantuan orang tua murid. Dengan kondisi sekolah yang layak harapannya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga meningkatkan semangat belajar. Disamping itu, bantuan dana untuk kegiatan belajar mengajar di luar sekolah seperti *study tour* dan studi wisata diharapkan juga dapat memacu kreativitas siswa.”

Pernyataan yang dikemukakan Ketua Komite Sekolah dibenarkan oleh Kepala Sekolah bahwa peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. Fathurrahman M.Sc.

“Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di luar sekolah mendapat dukungan dari orang tua. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk materiil maupun imateriil.”

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa sejauh ini dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan program pendidikan di sekolah baik kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun luar sekolah pihak orang tua juga telah banyak memberikan bantuan utamanya dalam bentuk immateriil dan materiil sehingga dapat meningkatkan gairah para murid untuk meningkatkan kreativitas dan mendapatkan prestasi.

4. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

a. Menyusun Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Luar Sekolah, Kegiatan Pembelajaran Karya Wisata dan Kegiatan Pembelajaran Keterampilan Lainnya

Komite Sekolah merupakan mitra sekolah. Berbagai langkah strategis sudah dilakukan oleh Komite sekolah untuk membantu sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Diantaranya menyusun pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru dengan tujuan untuk mendapatkan kesatuan program dan pelaksanaan dalam hubungan penyusunan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sekolah. Pihak sekolah mengajukan program – program pembangunan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah kepada Komite Sekolah. Kemudian Komite Sekolah akan memasukkan program tersebut dalam program pembangunan Komite Sekolah untuk pengembangan sekolah dan Komite Sekolah akan membantu sekolah dalam mencari dana dengan membuat proposal pengajuan dana kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan mengkomunikasikan program – program Komite Sekolah tersebut dengan orang tua dalam rapat antara guru, Komite Sekolah, dan orang tua untuk mendapatkan besarnya

dana yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena Komite Sekolah mempunyai peran sebagai pendukung finansial.

Selain itu, Komite Sekolah juga membantu kegiatan *study tour* maupun karya wisata dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Komite sekolah mengkomunikasikan program dan pelaksanaan *study tour* maupun karya wisata pada para guru agar ikut berpartisipasi dan mengkomunikasikan program serta pelaksanaannya pada orang tua murid. Dalam *study tour* maupun karya wisata Komite Sekolah membantu dengan dana, mencari bis, dan mencari obyek untuk *study tour* maupun karya wisata sesuai dengan keinginan guru maupun murid. Pada pertengahan tahun ajaran 2005/2006 SMP Negeri I Waru mengadakan *study tour* untuk dapat mendalami pelajaran Sejarah dan pelajaran Biologi. Untuk pelajaran Sejarah para murid diajak ke makam para Sunan. Sedangkan untuk pelajaran Biologi para murid diajak ke Gua Maharani untuk mempelajari Stalagtit dan Stalagmit. Selain itu, murid kelas IX mengadakan karya wisata ke Bali. Dimana kesemuanya didukung oleh Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hal tersebut dijelaskan Ibu Sri Utami selaku Humas SMP Negeri I Waru dalam wawancara pada tanggal 8 Juli 2006.

“Pada pertengahan semester sekolah kami mengadakan *study tour* ke Gua Maharani untuk pelajaran Biologi dan makam para Sunan untuk pelajaran Sejarah. Sedangkan pada akhir semester kelas IX mengadakan karya wisata ke Bali. Kesemuanya tersebut didukung oleh Komite Sekolah baik dalam hal dana maupun mencari Bis”

Disamping itu, Komite Sekolah juga turut membantu kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya. Komite Sekolah meminta bantuan dana dan sarana pada masyarakat di luar sekolah. Seperti kegiatan ketrampilan kerajinan tangan, Komite Sekolah bekerjasama dengan Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro mendatangkan alat – alat kerajinan tangan untuk membuat kerajinan sepatu. Selain itu, Komite Sekolah juga mendatangkan 20 unit komputer untuk membantu murid mempunyai ketrampilan dalam bidang komputer. Hal itu dilakukan Komite Sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

b. Mendatangkan Tenaga Pengajar Dari Luar Sekolah

Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, Komite Sekolah mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah untuk membimbing para murid agar mereka mempunyai ketrampilan dan dapat menyalurkan hobinya.

Tenaga pengajar dari luar sekolah tersebut kebanyakan merupakan para alumni dari SMP Negeri I Waru dimana mereka bersedia membantu sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Akan tetapi, juga ada tenaga dari luar sekolah yang bukan alumni SMP Negeri I Waru membantu pihak sekolah.

Tenaga pengajar ini diambil berdasarkan keahlian dan pengalamannya mengajar. Pada ekstra kurikuler Pramuka tenaga pengajarnya diambil dari bekas alumni SMP Negeri I Waru yang pernah memberikan prestasi dalam berbagai

perlombaan pramuka sehingga kualitas tenaga pengajar dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tidak perlu diragukan.

Selain itu, dalam bidang ketrampilan pihak sekolah mendatangkan pengrajin sepatu dari Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro sehingga diharapkan murid dapat mempunyai ketrampilan yang memadai karena diajar oleh tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa'i M.Ag dalam wawancara pada tanggal 3 Agustus 2006.

“Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah kami mendatangkan tenaga pengajar berasal dari luar sekolah namun mereka merupakan alumni sekolah kami yang pernah membawa nama harum sekolah kami. Selain itu, kami juga mendatangkan tenaga pengajar dalam bidang ketrampilan dengan mendatangkan pengrajin yang berasal dari Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro.”

Dengan kebijakan mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah yang didukung penuh oleh Komite Sekolah maka pihak sekolah mengharapakan para murid dapat meraih prestasi yang dapat dibanggakan sekolahnya.

C. Melakukan Program Kerjasama Dengan Pihak Luar Sekolah

Dalam membentuk siswa yang memiliki daya kreasi dan apresiasi tinggi pihak sekolah melalui Komite Sekolah melakukan program kerjasama dengan pihak luar sekolah / lembaga lain sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komite Sekolah yang bernama Drs. H.M Rifa'i M.Ag dalam wawancara pada tanggal 3 Agustus 2006 :

“Saya selaku Ketua Komite Sekolah berusaha melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar sekolah mustahil Komite Sekolah dapat menunjang kegiatan belajar mengajar.”

Kerjasama dengan pihak luar sekolah meliputi :

- a. Bekerjasama dengan pengrajin sepatu dalam mendidik siswa agar mempunyai ketrampilan yang dapat diandalkan.
- b. Bekerjasama dengan penjual kerajinan di Pasar Gedongan Waru dalam memasarkan barang kerajinan yang dibuat oleh para murid.
- c. Bekerjasama dengan agen perjalanan untuk dapat membantu para murid melakukan *study tour* maupun karya wisata.
- d. Pihak polsek juga kami ajak untuk keamanan sekolah. Mereka sering mengontrol keadaan sekolah kami.

Kerjasama dengan pihak luar sekolah tidak hanya mendatangkan pengrajin untuk mendidik para siswa agar mempunyai ketrampilan. Akan tetapi, juga bekerjasama dengan penjual kerajinan agar para murid terpacu untuk menunjukkan bakat dan ketrampilannya dan para murid tidak merasa bosan untuk belajar ketrampilan karena kerajinan yang mereka buat merasa dihargai oleh pihak sekolah.

Selain itu, pihak sekolah dalam melakukan *study tour* maupun karya wisata memaparkan kegiatannya kepada Komite Sekolah untuk mendapat dukungan agar kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Dalam mendukung kegiatan tersebut Komite Sekolah bekerjasama dengan agen perjalanan agar mereka

mendapatkan harga miring yang tentunya dapat meringankan biaya yang dikeluarkan pihak sekolah maupun orang tua murid.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

a. Faktor Intern

Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi antara lain hambatan yang terjadi di dalam sekolah tersebut (intern) antara lain :

- a. Terbatasnya waktu yang dimiliki anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan aktivitas Komite Sekolah.
- b. Orang tua murid belum sepenuhnya memahami makna penting kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Hambatan – hambatan tersebut merupakan tantangan tersendiri buat Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa’i M.Ag dalam wawancara tanggal 3 Agustus 2006 :

“Komite Sekolah dalam menjalankan tugasnya pasti mempunyai hambatan sekaligus tantangan yang berasal dari dalam sekolah. Antara lain waktu yang dimiliki anggota Komite Sekolah terbatas untuk melaksanakan aktivitas Komite Sekolah dan juga orang tua murid belum sepenuhnya memahami makna penting kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.”

Komite Sekolah yang di dalamnya merupakan gabungan dari guru, orang tua murid, maupun masyarakat pasti mempunyai kerja selain menjadi anggota Komite Sekolah. Anggota Komite Sekolah yang dipilih sekolah melalui rapat antara guru, orang tua murid dan masyarakat merupakan orang – orang sibuk. Dengan keadaan ini anggota Komite Sekolah kadang – kadang tidak sempat menjalankan program Komite Sekolah. Hal ini sebagaimana diungkapkan seorang guru yang bernama Nana Herlina S.Pd dalam wawancara tanggal 8 Juli 2006:

“Ketua Komite Sekolah kami merupakan orang sibuk karena mengajar di berbagai tempat mulai dari SMP sampai tingkat universitas sehingga kami kadang – kadang merasa kesulitan untuk meminta persetujuan Komite Sekolah terhadap program – program yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.”

Selain itu, kadang – kadang Komite Sekolah kesulitan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah karena orang tua murid tidak menyadari pentingnya kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hal ini terlihat pada penarikan dana untuk *study tour* sebagian orang tua murid ada yang keberatan. Padahal Komite Sekolah telah membantu dengan mencarikan bis yang murah sehingga dana yang diminta pihak sekolah tidak seberapa besar. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwa kegiatan *study tour* hanya merupakan kegiatan foya – foya.

b. Faktor Ekstern

Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari

dalam sekolah sendiri tapi juga berasal dari luar sekolah (ekstern). Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komite Sekolah SMP Negeri I Waru yang bernama Drs. H.M Rifa'i M.Ag dalam wawancara tanggal 3 Agustus 2006 :

“Hambatan – hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tidak hanya berasal dari dalam sekolah sendiri tapi juga berasal dari luar sekolah sendiri. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Komite Sekolah.”

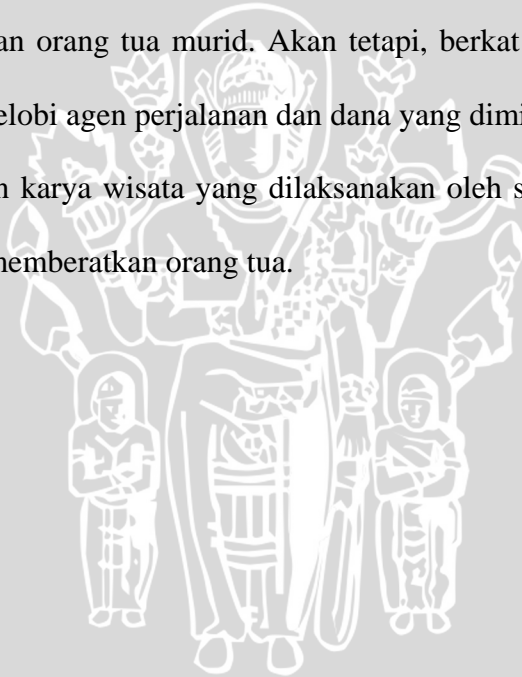
Hambatan – hambatan yang berasal dari luar sekolah yang merupakan tantangan bagi Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain :

- a. Pihak luar / masyarakat lebih memperhitungkan keuntungan yang didapatnya bila melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan. Hal ini menyulitkan pihak sekolah untuk dapat bekerjasama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
- b. Umumnya masyarakat belum mengerti tentang kegunaan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah bagi murid sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk ikut membantunya baik dalam bentuk pemikiran maupun dana.

Kerjasama dengan pihak luar merupakan kesulitan tersendiri bagi sekolah karena mereka memperhitungkan keuntungan yang didapatnya. Hal ini terlihat ketika Komite Sekolah ingin bekerjasama dengan pengrajin sepatu dari Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro. Pada awalnya mereka tidak mau bekerjasama dengan sekolah dalam

bidang ketrampilan membuat sepatu. Akan tetapi, karena lobi dari Komite Sekolah yang memaparkan keuntungan yang akan didapat bila bekerjasama dengan sekolah dan bantuan dari seorang teman dari Komite Sekolah yang kebetulan kenal dengan pengrajin Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro membuat pengrajin mau bekerjasama dengan pihak sekolah.

Pada waktu melakukan *study tour* maupun karya wisata pihak sekolah tidak diberi keringanan apapun maupun harga sekolah oleh agen perjalanan sehingga memberatkan sekolah dan orang tua murid. Akan tetapi, berkat campur tangan dari Komite Sekolah yang melobi agen perjalanan dan dana yang dimiliki Komite Sekolah maka *study tour* maupun karya wisata yang dilaksanakan oleh sekolah dapat diikuti semua murid dan tidak memberatkan orang tua.



B. Analisis dan Interpretasi

1. Proses Implementasi Kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru

a. Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Instansi Terkait (Dinas Pendidikan) Mengenai Komite Sekolah

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, proses implementasi kebijakan Komite Sekolah melibatkan berbagai elemen, yang dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi yang terkait dengan masalah pendidikan. Setiap unsur-unsur yang terlibat melakukan langkah-langkah agar kebijakan dapat diteruskan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks implementasi kebijakan, Dinas Pendidikan berkapasitas sebagai instansi terkait yang secara struktural membawahi lembaga pendidikan, termasuk SMP Negeri 1 Waru.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menetapkan kebijakan operasional sebagai desain awal menemukan obyek sasaran terhadap kebijakan ini. Penetapan kebijakan operasional tepat dilakukan terkait upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pendidikan, dan penataan kembali formula pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Selanjutnya, Dinas Pendidikan mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada lembaga penyelenggara pendidikan termasuk SMP Negeri 1 Waru untuk melaksanakan kebijakan dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing sekolah.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mencakup aspek pelaksanaan Komite Sekolah. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan berupaya untuk terus *mensupport* pelaksanaan Komite Sekolah, antara lain dengan mengusahakan terbentuk dan berfungsinya Komite Sekolah pada semua lembaga dan Dewan Pendidikan pada kantor Dinas dan Cabang di seluruh Kabupaten Sidoarjo sebagai partner dalam pengambilan kebijakan, mengadakan seminar atau *workshop* untuk sosialisasi pelaksanaan Komite Sekolah, membantu penyaluran *Block Grant* dari Dinas Pendidikan Pusat dengan persetujuan dari Komite Sekolah sehingga memaksa setiap sekolah mempunyai Komite Sekolah. Selain itu, upaya pendampingan tetap dilakukan oleh Dinas Pendidikan baik diminta maupun tidak, karena untuk pelaksanaan dan pembentukan Komite Sekolah harus terus dilakukan *monitoring* agar dapat berhasil sesuai dengan target sasaran.

Sejumlah biaya telah dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo guna menunjang pelaksanaan Komite Sekolah. Langkah yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan. Proses implementasi kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria efektif menurut Grindle dalam Wahab (2004:127) yaitu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah biaya atau dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

b. Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Waru Mengenai Komite Sekolah

Dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru, Kepala Sekolah melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan kapasitasnya selaku *stakeholder* yang secara struktural memiliki posisi tertinggi di SMP Negeri 1 Waru. Kepala Sekolah memiliki kewenangan yang bersifat konstruktif, positif, relevan, dan potensial untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pendidikan serta kemajuan sekolah.

Sebagai jawaban atas pelaksanaan Komite Sekolah, Kepala Sekolah menyusun suatu konsep pribadi yang kemudian dikomunikasikan dengan para *stakeholders* lain di SMP Negeri 1 Waru. Langkah yang dilakukan ini direspon positif oleh mereka, dan secara bersama-sama ikut berperan serta dalam proses implementasi kebijakan Komite Sekolah. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur yang terlibat dalam program sekolah.

Dengan kewenangan ini, Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru telah melakukan langkah yang terbagi dalam 2 langkah. Langkah pertama sebagai langkah awal menunjukkan kesigapan Kepala Sekolah dalam mempersiapkan diri menerapkan Komite Sekolah utamanya dengan memberikan pembekalan kepada para guru dan orang tua murid tentang Komite Sekolah. Langkah kedua sebagai langkah untuk

pembentukan Komite Sekolah beserta program – program yang dibuat Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Dalam hal ini, Kepala Sekolah telah berusaha memahami kondisi sekolah, peserta didik, dan orang tua murid sehingga mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing komponen, maka Kepala Sekolah dapat menentukan langkah-langkah tepat yaitu dengan melalui pendekatan dan menjalin komunikasi agar pelaksanaan Komite Sekolah dapat diterima oleh sekolah, peserta didik, dan orang tua murid sehingga Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah terealisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Komite Sekolah menggunakan pendekatan berperilaku menurut Wahab (2004:110-120) yaitu pendekatan berperilaku diawali dengan suatu kesadaran seringkali terdapat kebijakan yang baru dikeluarkan oleh karena itu harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran dan perlu juga mempersiapkan sarana yang diperlukan serta musyawarah sehingga dapat memberikan pengertian yang mendalam dan akhirnya kebijakan tersebut mendapat dukungan.

Dalam pelaksanaan Komite Sekolah, langkah yang diambil Kepala Sekolah menunjukkan respon dan sikap positif yang dapat mendukung pelaksanaan Komite Sekolah, yaitu dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru telah melakukan tugasnya sebagai lembaga pelaksana yang berupaya mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dan langkah Kepala SMP Negeri I Waru ini juga merupakan salah satu bentuk ketaatan *target group* yaitu ketaatan obyek yang menjadi sasaran kebijakan dengan segenap kemampuannya mewujudkan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan Komite Sekolah.

2. Peran Serta Orang Tua Murid Dalam Menunjang Tugas – Tugas Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru

a. Tingkat Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menentukan Kebijakan yang Dapat Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

Dalam pelaksanaan Komite Sekolah, pihak SMP Negeri 1 Waru telah berhasil mengajak seluruh orang tua murid untuk turut terlibat dengan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun luar sekolah. Dalam rapat dengan orang tua murid, disampaikan tentang konsep dan orientasi Komite Sekolah, selain itu juga disampaikan tentang program-program sekolah. Dengan diadakannya rapat tersebut, maka keikutsertaan orang tua murid dalam menentukan kebijakan terhindar dari unsur paksaan dan tekanan, sehingga atas dasar suka rela orang tua murid senantiasa memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program sekolah pada umumnya dan pelaksanaan Komite Sekolah pada khususnya. Selain itu, orang tua murid juga terlibat dalam kepengurusan Komite Sekolah.

Pelaksanaan kebijakan di SMP Negeri I Waru dapat dilakukan dengan baik karena pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan yang dilakukan dengan rapat untuk membahas tentang Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun luar sekolah dan program-program yang akan dilakukan, kemudian dengan mengikutsertakan orang tua murid dalam menentukan kebijakan untuk membangun suatu komunikasi dan koordinasi yang sempurna sehingga dapat mengetahui lingkungan sosial ekonomi untuk selanjutnya menjadi perhatian yang serius dari pihak sekolah.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan di SMP Negeri 1 Waru dapat dilakukan dengan baik karena didukung oleh partisipasi orang tua murid yang tinggi, sehingga pemahaman terhadap pelaksanaan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dapat terealisasi dengan baik.

b. Bentuk Partisipasi Orang Tua Murid Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah Melalui Pelaksanaan Komite Sekolah.

Sebagai bukti nyata adanya kepedulian yang tinggi atas pendidikan, orang tua murid memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, baik dukungan materiil maupun immateriil. Dukungan materiil berupa sumbangan finansial. Sedangkan dukungan immateriil berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan dan *mem-back up*

pelaksanaan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Adanya koordinasi dan komunikasi yang sempurna dengan orang tua murid merupakan solusi terbaik untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Komite Sekolah.

Partisipasi yang dilakukan oleh orang tua murid merupakan pelaksanaan dari salah satu pilar dalam pelaksanaan Komite Sekolah. Dengan pilar partisipasi, Komite Sekolah merupakan model pengelolaan sekolah yang menekankan partisipasi seluruh elemen termasuk orang tua murid untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Secara tidak langsung, partisipasi yang telah ditunjukkan oleh orang tua murid mampu menjadi suntikan moral kepada sekolah dan guru sehingga hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru. Dengan keikutsertaan orang tua murid dalam berbagai program kegiatan yang dilaksanakan Komite Sekolah juga menunjukkan adanya suatu komunikasi dan penerimaan oleh orang tua murid terhadap program-program yang dicanangkan oleh sekolah.

3. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

a. Menyusun Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pembelajaran Karya Wisata dan Kegiatan Pembelajaran Ketrampilan Lainnya.

Langkah - langkah yang dilakukan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah adalah menyusun pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran karya wisata dan kegiatan pembelajaran lainnya.

Hal yang pertama kali dilakukan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah adalah menyusun pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tidak mungkin dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru dengan tujuan untuk mendapatkan kesatuan program dan pelaksanaan dalam hubungan penyusunan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sekolah. Komite Sekolah membuat program pembangunan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan menghitung besarnya dana yang dibutuhkan. Kemudian Komite Sekolah mencari dana tersebut dengan membuat proposal dana kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo yang nantinya diteruskan ke Dinas Pendidikan Pusat di Jakarta. Dana yang berasal

dari Dinas Pendidikan Pusat tidak mungkin dapat menutupi keseluruhan biaya sehingga Komite Sekolah juga meminta bantuan kepada orang tua.

Langkah berikutnya yang dilakukan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yaitu dengan membantu pelaksanaan *study tour* maupun karya wisata. Komite Sekolah mendukung kegiatan tersebut dengan membantu dana, mencari bis dan mencari obyek untuk *study tour* maupun karya wisata sehingga tidak memberatkan orang tua dalam hal biaya dan semua murid bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Disamping membantu kegiatan *study tour* maupun karya wisata Komite Sekolah juga membantu kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya. Kegiatan ketrampilan yang termasuk dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain kegiatan ketrampilan kerajinan tangan, komputer, dan ketrampilan lainnya. Komite Sekolah membantu kegiatan tersebut dengan bekerjasama dengan Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro dalam menunjang ketrampilan kerajinan tangan baik dalam hal alat yang dibutuhkan maupun tenaga pengajarnya. Selain itu, Komite Sekolah juga membantu ketrampilan dalam bidang komputer dengan mendatangkan 20 unit komputer.

b. Mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah

Salah satu cara Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yaitu mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah. Cara tersebut

dilakukan agar para murid diajar oleh tenaga pengajar yang khusus mengajar bidang tertentu sehingga para murid mempunyai ketrampilan yang dapat diandalkan.

Komite Sekolah mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah yang merupakan para alumni SMP Negeri I Waru yang menginginkan sekolahnya maju. Disamping para alumni ada tenaga pengajar yang bukan alumni SMP Negeri I Waru membantu pihak sekolah.

Hal ini terlihat pada ekstra kurikuler Pramuka dimana tenaga pengajarnya diambil dari alumni SMP Negeri I Waru yang turut membantu kemajuan sekolah dengan memberikan prestasi yang patut dibanggakan. Selain itu, dalam bidang ketrampilan Komite Sekolah mendatangkan pengrajin sepatu dari Pusat Kerajinan Sepatu Wedoro dimana mereka bukan alumni SMP Negeri I Waru tetapi mereka bersedia membantu Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Melalui cara ini pihak sekolah berharap para murid dapat meraih prestasi yang dapat dibanggakan sekolahnya maupun dirinya sendiri. Selain itu, agar para murid dapat mengembangkan ketrampilannya pada masyarakat.

C. Melakukan Program Kerjasama Dengan Pihak Luar Sekolah

Sebagai upaya menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, maka Komite Sekolah melakukan program kerjasama dengan pihak luar sekolah. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan murid dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka akan

dapat membentuk SDM yang *multi-skill* sebagai jawaban terhadap tuntutan era globalisasi. Konsep Komite Sekolah ini harus diimbangi dengan *target group* yang mendukung, sehingga tercipta kondisi yang sesuai dengan konsep ideal.

Kerjasama yang dilakukan Komite Sekolah dengan pihak luar sekolah meliputi kerjasama dengan pengrajin sepatu dalam mendidik siswa agar mempunyai ketrampilan yang dapat diandalkan. Selain itu, Komite Sekolah juga bekerjasama dengan penjual kerajinan. Hal ini dilakukan agar para murid terpacu untuk menunjukkan bakat dan ketrampilannya sehingga para murid tidak merasa bosan untuk belajar ketrampilan karena kerajinan yang mereka buat merasa dihargai oleh pihak sekolah.

Dalam membantu para murid belajar mengenai pelajaran yang di sekolah tapi dilakukan di luar sekolah seperti *study tour* Komite Sekolah melakukan kerjasama dengan agen perjalanan. Kerjasama ini dilakukan agar biaya perjalanan yang ditawarkan agen perjalanan murah sehingga orang tua murid tidak merasa keberatan dalam hal biaya dan seluruh para murid dapat mengikuti *study tour* mengingat *study tour* ini penting bagi para murid untuk menambah pengetahuannya disamping pelajaran di dalam kelas.

Program kerjasama ini direspon positif oleh *target group*. Sikap responsif tersebut menunjukkan ketaatan *target group* yang merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru Dalam Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di Luar Sekolah

a. Faktor Intern

Faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan Komite Sekolah agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah adalah kadang – kadang orang tua juga tidak mendukung program Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah karena mereka tidak memahami betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar tersebut. Mereka menganggap kegiatan seperti *study tour* maupun karya wisata merupakan kegiatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, pada pertemuan Komite Sekolah dengan para orang tua murid mereka menjelaskan betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar di luar sekolah seperti *study tour* untuk membantu para murid mendapat pengetahuan baru.

Hambatan lain yang dijumpai mengenai pelaksanaan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah adalah terbatasnya waktu yang dimiliki anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan aktivitas Komite Sekolah. Hal ini dikarenakan anggota Komite Sekolah yang dipilih merupakan orang – orang sibuk yang tidak hanya bekerja sebagai anggota Komite Sekolah saja. Mereka terdiri dari berbagai macam orang yang mempunyai pekerjaan berbeda – beda. Dengan keadaan tersebut membuat program Komite Sekolah sedikit terhambat dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hambatan – hambatan yang

berasal dari dalam sekolah ini akan diatasi Komite Sekolah agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

b. Faktor Ekstern

Secara umum pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Waru tidak hanya menemui hambatan yang berasal dari dalam sekolah tetapi juga hambatan dari luar sekolah. Akan tetapi, Komite Sekolah berusaha mengatasi hambatan tersebut agar Komite Sekolah dapat menjalankan tugasnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Williams dalam Wahab (2004:61) tentang *implementation capacity* yaitu kemampuan suatu organisasi / aktor yang akan melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Hambatan yang berasal dari luar sekolah antara lain pihak luar / masyarakat lebih memperhitungkan keuntungan yang didapatnya bila melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dan umumnya masyarakat belum mengerti tentang kegunaan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah bagi murid sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk ikut membantunya baik dalam bentuk pemikiran maupun dana. Untuk mengatasi hambatan tersebut Komite Sekolah memberikan pengertian dan pengetahuan tentang pentingnya kegiatan belajar mengajar bagi para murid dan keuntungan yang didapat bila bekerjasama dengan pihak sekolah, sehingga mereka mau membantu Komite Sekolah baik dalam bentuk pemikiran maupun dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian sebelumnya yaitu pembahasan tentang implementasi kebijakan Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dengan suatu studi pada SMP Negeri I Waru yang meliputi proses implementasi kebijakan, peran serta orang tua murid dalam mendukung pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru, upaya-upaya yang dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri I Waru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, dan hambatan yang dihadapi Komite Sekolah SMP Negeri I Waru maka setelah dilakukan penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan ;

1. Dalam proses implementasi kebijakan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru terdapat dua variabel antara lain :
 - a. Pelaksanaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mengenai Komite Sekolah dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berkapasitas sebagai instansi terkait yang secara struktural membawahi lembaga pendidikan termasuk SMP Negeri I Waru. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menetapkan kebijakan operasional yang selanjutnya mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada lembaga penyelenggara

pendidikan termasuk SMP Negeri 1 Waru. Selain itu, Dinas Pendidikan Sidoarjo melakukan peninjauan apakah Komite Sekolah di sekolah tersebut ada dan berfungsi sebagaimana yang digariskan.

- b. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Waru mengenai Komite Sekolah dengan melakukan langkah pertama yaitu memberikan pembekalan kepada para guru dan orang tua murid tentang Komite Sekolah. Langkah kedua yaitu pembentukan Komite Sekolah beserta program – program yang dibuat Komite Sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
2. Dalam pelaksanaan Komite Sekolah khususnya di SMP Negeri I Waru peran serta orang tua murid memiliki arti penting agar tujuan Komite Sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tercapai antara lain :
 - a. Tingkat partisipasi orang tua murid dalam menentukan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah tinggi yaitu dengan keikutsertaan dalam rapat untuk menentukan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah dan terlibat dalam kepengurusan Komite Sekolah.
 - b. Bentuk partisipasi orang tua murid dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan baik berupa

immateriil maupun materiil yang dapat dilihat perwujudannya dengan segala pembaharuan di SMP Negeri I Waru.

3. Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru juga melakukan berbagai upaya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah antara lain :

- a. Menyusun pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran karya wisata, kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya dimana pihak sekolah mengajukan program – program pembangunan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah kepada Komite Sekolah kemudian Komite Sekolah mencari dana dan mengkomunikasikan program – program Komite Sekolah tersebut dengan orang tua dalam rapat antara guru, Komite Sekolah, dan orang tua untuk mendapatkan besarnya dana yang dibutuhkan. Dalam *study tour* maupun karya wisata Komite Sekolah membantu dengan dana, mencari bis, dan mencari obyek untuk *study tour* maupun karya wisata sesuai dengan keinginan guru maupun murid. Selain itu, Komite Sekolah membantu kegiatan pembelajaran ketrampilan lainnya yaitu dengan mendatangkan alat kerajinan tangan untuk membuat kerajinan sepatu dan mendatangkan 20 unit komputer.
- b. Mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah dimana Komite Sekolah mendatangkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya. Tenaga pengajar tersebut ada yang merupakan alumni SMP Negeri I Waru.

- c. Melakukan program kerjasama dengan pihak luar sekolah antara lain bekerjasama dengan pengrajin sepatu dalam mendidik siswa agar mempunyai ketrampilan yang dapat diandalkan, bekerjasama dengan penjual kerajinan di Pasar Gedongan Waru dalam memasarkan barang kerajinan yang dibuat oleh para murid, bekerjasama dengan agen perjalanan untuk dapat membantu para murid melakukan *study tour* maupun karya wisata, pihak polsek juga diajak untuk keamanan sekolah. Mereka sering mengontrol keadaan sekolah.
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru antara lain :
 - a. Faktor intern yaitu terbatasnya waktu yang dipunyai anggota Komite Sekolah dalam melaksanakan aktivitas Komite Sekolah, orang tua murid belum sepenuhnya memahami makna penting kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
 - b. Faktor ekstern yaitu pihak luar / masyarakat lebih memperhitungkan keuntungan yang didapatnya bila melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan dan mereka belum mengerti tentang kegunaan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah bagi para murid. Hal ini yang menyulitkan pihak Komite Sekolah untuk bekerjasama dengan pihak luar / masyarakat.

B. Saran

Setelah memperhatikan penjelasan hasil penelitian dan berhasil dalam membuat kesimpulan maka ditemukan beberapa hal yang dapat menjadikan perhatian khusus agar tujuan pelaksanaan Komite Sekolah dapat berhasil dengan baik. Sebagai saran :

1. Akan lebih baik jika Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana administratif membuat pengaturan yang lebih rinci tentang Komite Sekolah. Hal ini mengingat kondisi dari masing – masing SMP yang ada di daerah - daerah lain tidak seragam padahal Komite Sekolah wajib dibentuk sehingga yang terjadi asal bisa dibentuk saja. Selain itu, melakukan pengawasan yang rutin setidaknya 6 bulan sekali terhadap semua Komite Sekolah. Selama ini Dinas Pendidikan meninjau Komite Sekolah bila ada masalah yang muncul di permukaan dan bila pihak sekolah meminta bantuan. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung keberhasilan dalam setiap implementasi kebijakan karena akan terhindar dari kesalahan interpretasi.
2. Kepada Komite Sekolah di SMP Negeri I Waru untuk tidak berhenti sampai disini saja melakukan suatu pembaharuan, tetapi terus melakukan terobosan sejauh itu dipandang relevan, efektif, dan efisien untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah di SMP Negeri I Waru misalnya dengan membuka kelas Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai kegiatan ekstra

tambahan disamping ekstra komputer yang sudah ada lebih dahulu, dan berupaya menyelenggarakan pendidikan yang memberikan para murid bekal ketrampilan untuk dapat digunakan sewaktu lulus nanti.

3. Perlu memasyarakatkan secara intensif tentang keberadaan Komite Sekolah menyangkut fungsi dan programnya lewat media, brosur, dan pertemuan – pertemuan sehingga tidak terjadi ada orang tua dan guru yang tidak mengetahui tentang Komite Sekolah dan tidak ada yang mengatakan Komite Sekolah sama dengan BP – 3 dimana hanya ganti nama saja.
4. Kepada masyarakat dan orang tua murid SMP Negeri I Waru untuk terus bekerjasama mendukung setiap kebijakan dan program yang bersifat positif yang ditawarkan pihak sekolah dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah khususnya melalui pelaksanaan Komite Sekolah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindawati, Anika Erliena dan Huda, Hasbullah. 2004. *Beberapa Alternatif Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Djamarah, Syaiful Bahri, Drs. dan Zain, Asan, Drs. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Islamy, M., Irfan, Dr., MPA. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. 1988. *Analisa Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohid. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Roestiyah. 2001. *Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta : Intermedia
- Sagala, Saiful. 2003 *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno. 2006. *Pedoman Kerja Komite Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama
- Supratiknya, A. 2004. *Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Sekolah di Tanah Air*. Jakarta : Kompas.

Suryosubroto, B. 1997. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali.

Usman, Moh. Uzer, Drs. dan Setiawati, Lilis, Dra. 1993. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

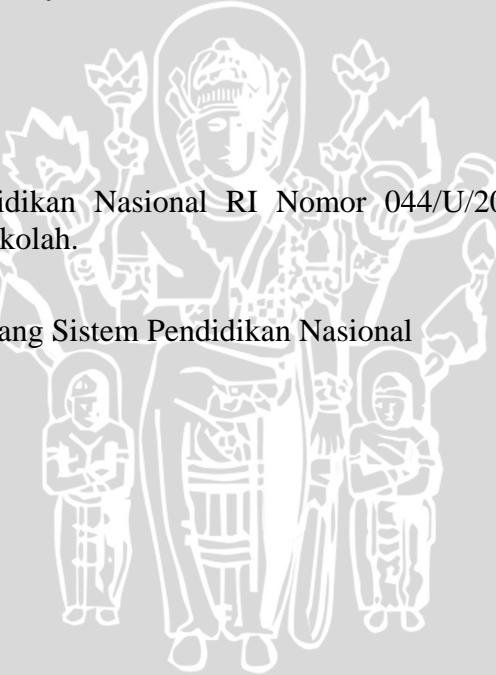
Wahab, Solichin, Abd. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Intermedia.

Undang-Undang

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



KEPUTUSAN**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 044/U/2002****TENTANG****DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH****MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL****Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal;
- b. bahwa dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

1. Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Bupati/Walikota,
7. Semua Gubernur,
8. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota,
9. Semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota,
10. Komisi VI DPR RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Muslikh, S.H.
NIP.131479478

SALINAN

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 044/U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002**

ACUAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

I. PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP

1. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota,
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati.
3. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota;
2. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

III. TUJUAN

Dewan Pendidikan bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

IV. PERAN DAN FUNGSI

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:

5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
8. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
9. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Dewan Pendidikan

- a. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 - e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 - f. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - g. Komite Sekolah.
 2. Unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang).

- b. Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
2. **Kepengurusan Dewan Pendidikan**
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD.
3. **Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)**
 - a. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD dan ART;
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nama dan tempat kedudukan;
 2. Dasar, tujuan dan kegiatan;
 3. Keanggotaan dan kepengurusan;
 4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 5. Keuangan;
 6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 7. Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

1. **Prinsip Pembentukan**

Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut

 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis
 - b. merupakan mitra pemerintah Kabupaten/Kota
2. **Mekanisme Pembentukan**
 - a. Pembentukan Panitia Persiapan
 1. Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan

Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang Dewan Pendidikan menurut Keputusan ini;

- b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
- e. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
- f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
- g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/Walikota:

- b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/Walikota menetapkan Dewan Pendidikan.

3. **Penetapan pembentukan Dewan Pendidikan**

Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. **TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI**

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

VIII. **PENUTUP**

1. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
2. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, gedung E lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta telpon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608, website <http://www.depdiknas.go.id/>, email: dpkp2002@yahoo.com

SALINAN**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 044/U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002****ACUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH****I. PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP**

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
3. Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan;
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya;
3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. TUJUAN

Komite Sekolah bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. PERAN DAN FUNGSI

Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
8. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
9. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
10. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Komite Sekolah
 - a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:

- a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. dunia usaha/industri;
 - e. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f. wakil alumni;
 - g. wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
 - b. Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
2. Kepengurusan Komite Sekolah:
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
 3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
 - a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nama dan tempat kedudukan;
 2. Dasar, tujuan dan kegiatan;
 3. Keanggotaan dan kepengurusan;
 4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 5. Keuangan;
 6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 7. Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

1. Prinsip Pembentukan
Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis;
 - b. merupakan mitra satuan pendidikan.
2. Mekanisme Pembentukan
 - a. Pembentukan Panitia Persiapan

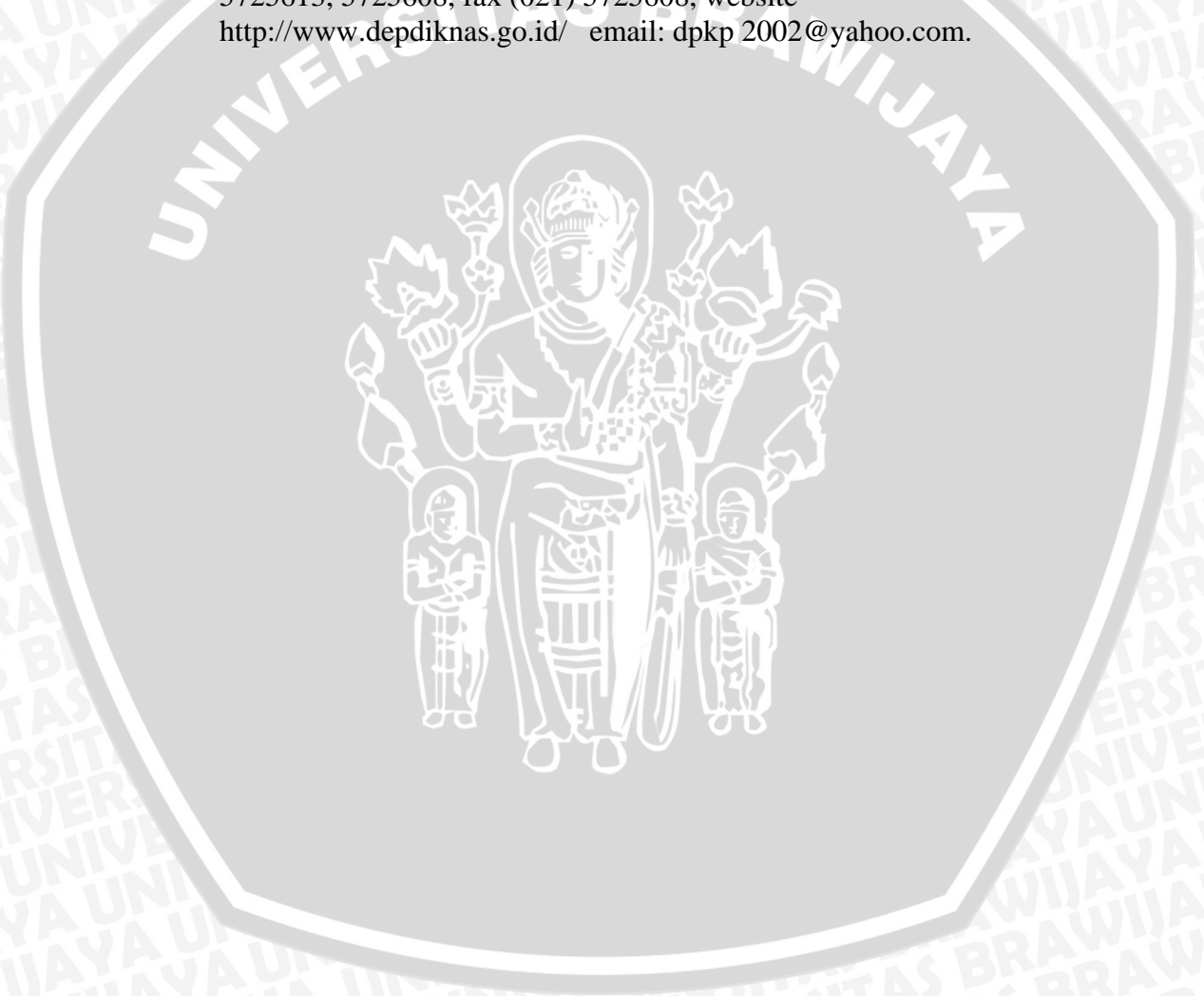
1. Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.
2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
 - b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
 - g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
3. Penetapan pembentukan Komite Sekolah
Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

VIII. PENUTUP

1. Dalam Pembentukan Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
3. Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telpon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608, website <http://www.depdiknas.go.id/> email: dpkp.2002@yahoo.com.



BIODATA PENULIS

1. Nama : Qurnia Ricky .Y
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Juni 1984
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Alamat Malang : Jl. Kyai Tamin V/15
5. Alamat Asal : Jl. Cendrawasih Bund.130 Waru–Sidoarjo
(031) 8662753
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Kepuh Kiriman I Waru (1990-1996)
 - b. SMP Negeri I Waru (1996-1999)
 - c. SMA Negeri 5 Surabaya (2002-Sekarang)

